

## ANALISIS TINGKAT HUBUNGAN DAN KONDISI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PDRB KABUPATEN MALUKU TENGAH

*Fildo de Lima<sup>1</sup>, Aziz Nur Bambang<sup>2</sup>, Jusup Suprijanto<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro  
Jl. Imam Bardjo, SH No 5 Semarang 50241, telp/ Fax. (024)8452560.

<sup>2</sup>Pengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang 50275, Telp/Fax: (024)7474698.  
*Alamat Korespondensi: fildod@yahoo.com*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat hubungan pendapatan sektor perikanan dengan PDRB Kabupaten Maluku Tengah dan menganalisis apakah sektor perikanan termasuk sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan metode *Location Quotien (LQ)*. Pada tahun 2011 potensi ikan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebesar 835.400 ton/tahun. Hasil analisis korelasi antara sektor perikanan dengan PDRB menunjukkan hubungan yang positif. Dengan nilai koefisien korelasi 0,986, yang artinya pendapatan sektor perikanan berkorelasi kuat dengan PDRB Kabupaten Maluku Tengah. Dilihat dari nilai probabilitas pendapatan sektor perikanan berpengaruh nyata terhadap PDRB. Persamaan regresi antara nilai pendapatan sektor perikanan dengan PDRB Kabupaten Maluku Tengah adalah:  $Y = 21870,458 + 0,986 X$ . Uji  $t$  menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel dengan demikian disimpulkan bahwa pendapatan sektor perikanan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah. Hasil analisis LQ sektor perikanan menurut data harga konstan 2000 menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2007 (0,372) hingga 2011 (0,366). Hasil ini juga menunjukkan bahwa sektor Perikanan bukan merupakan sektor unggulan, karena nilai  $LQ < 1$ . Apabila ditinjau dari potensi sektor perikanan dan kelautan yang cukup besar di Kabupaten Maluku Tengah, sektor perikanan dapat dijadikan salah satu sektor ekonomi unggulan daerah. Hal ini berarti sektor perikanan belum dikelola secara optimal, pengelolaan sektor perikanan secara optimal diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

**Kata kunci :** sektor perikanan, PDRB, *location quotien*.

### PENDAHULUAN

Karakteristik geografis dan kandungan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia memberikan pengakuan (justifikasi) bahwa Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati yang tinggi (*mega-biodiversity*). Fakta ini menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan sektor yang memiliki peluang potensial untuk dimanfaatkan dan dikelola guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor perikanan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh baik ditingkat pusat maupun dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alamnya.

Salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah ukuran Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata yang mungkin dicapai masyarakat (Sutiardi, 2001). Untuk itu, upaya peningkatan peranan dan

kontribusi yang nyata dari suatu sektor terhadap PDRB perlu terus diupayakan antara lain melalui optimalisasi pengembangan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Dengan luas lautan 98,80% (264.311,43 Km<sup>2</sup>) dari seluruh total luas wilayah dan memiliki potensisumberdaya hayati perikanan terdiri dari pelagis, demersal, dan biota lainnya yang perlu dieksploitasi secara optimal dan berkelanjutan (Tabel 1). Dilihat dari besarnya potensi yang tersedia, maka untuk tahun 2011 telah dimanfaatkan sebesar 835.400 ton (9,93%) dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 667.800 ton/tahun. Dalam eksploitasi potensi dimaksud, perlu ditunjang dengan berbagai faktor penunjang produksi seperti Rumah Tangga Perikanan (RTP), armada penangkapan, unit penangkapan dan lain-lain sebagainya (Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah, 2011).

Tabel 1. Potensi sumberdaya alam laut Kabupaten Maluku Tengah

No	Jenis Sumberdaya	Volume (Ton)	JTB (Ton)
1.	Ikan Pelagis Besar (0-4 mil laut)	210.700	1.754,23
2.	Ikan Pelagis Kecil	510.800	4.307,46
3.	Ikan Demersal	93.100	1.409,66
4.	Ikan Karang	12.000	9.600
5.	Udang	1.600	1.200
6.	Cumi-Cumi	7.200	5.800
Total		835.400	667.800

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah 2011

Tulisan ini bertujuan untuk (1) menganalisis tingkat hubungan antara pendapatan sektor perikanan dengan PDRB Kabupaten Maluku Tengah dan (2) menganalisis sektor perikanan apakah termasuk sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu selama 5 tahun (2007-2011).

Hipotesis pada penelitian ini adalah: Diduga nilai pendapatan sektor perikanan berpengaruh secara signifikan/ nyata terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder *time series* selama kurun waktu lima tahun (2007-2011) yang bersumber dari data statistik PDRB dan statistik dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Maluku Tengah.

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini meliputi analisa secara deskriptif kuantitatif. Analisa deskriptif kuantitatif dilakukan untuk: mengetahui signifikansi hubungan antara nilai kontribusi pendapatan sektor perikanan dengan PDRB dan mengetahui apakah sektor perikanan termasuk sektor unggulan terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Maluku Tengah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan dua metode (Riduwan dan Sunarto, 2007):

## Metode analisis statistik

### a. Analisis korelasi

Analisa korelasi digunakan untuk mencari keeratan hubungan antara PDRB Kabupaten Maluku Tengah dengan pendapatan sektor perikanan. Rumus untuk uji korelasi adalah :

$$r_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{\sqrt{(\sum x_i^2) (\sum y_i^2)}}$$

Keterangan :

Y<sub>i</sub> : PDRB Kabupaten Maluku Tengah tahun 2007-2011 (Rp)

X<sub>i</sub> : Pendapatan sektor perikanan terhadap PDRB tahun 2007-2011 (Rp).

i : tahun ke-

### b. Regresi linier sederhana

Analisa regresi linier sederhana digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada analisis ini satu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dalam Penelitian ini yang tergolong sebagai variabel terikat adalah PDRB Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan yang tergolong variabel bebas adalah pendapatan sektor perikanan. Model matematis dari regresi linier sederhana adalah :

$$Y_i = a + b_{x_i}$$

Keterangan :

Y<sub>i</sub> : PDRB Kabupaten Maluku Tengah tahun 2007-2011 (Rp)

a : konstanta

b : koefisien parameter untuk sektor perikanan

x<sub>i</sub> : pendapatan sektor perikanan (Rp)

Dalam analisa regresi sederhana akan dilakukan pengujian model yaitu:

#### 1. Uji Regresi Secara Keseluruhan

Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji F, pengujian ini dilakukan untuk membuktikan keberadaan pengaruh yang berarti dari variabel bebas (pendapatan sektor perikanan) terhadap variabel terikat (PDRB) dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

R<sup>2</sup> : koefisien determinasi

k : jumlah variabel bebas

n ; jumlah data

Hipotesis yang digunakan adalah:

H<sub>0</sub> ; b = 0: diduga pendapatan sektor perikanan tidak berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah.

H<sub>1</sub> ; b ≠ 0: diduga pendapatan sektor perikanan berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah.

Kriteria yang digunakan untuk uji F adalah :

- F tabel < F hitung : H<sub>0</sub> ditolak.

- F tabel > F hitung : H<sub>0</sub> diterima.

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan besarnya proporsi variabel bebas dari variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas, nilai R<sup>2</sup> ini

terletak antara 0-1, semakin tinggi nilai  $R^2$  maka semakin baik hasil regresinya, begitu juga sebaliknya. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas yaitu hubungan linier yang sempurna atau pasti, maka jika nilai  $r$  (korelasi antara variabel bebas) kurang dari  $R^2$ , maka dalam regresi tersebut tidak terdapat multikolinieritas diantara beberapa variabel atau semua variabel.

## 2. Uji Regresi Secara Parsial

Uji ini dilakukan dengan memakai uji t, pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikan setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumusan sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan:

- $t_{hitung}$  : Harga yang dihitung dan menunjukkan nilai standar deviasi dari distribusi t (Tabel t).
- $\bar{x}$  : Rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.
- $\mu_0$  : Nilai yang dihipotesiskan
- $s$  : standar deviasi sampel yang dihitung.
- $n$  : jumlah sampel penelitian

Pengujian uji t bertujuan untuk mengetahui apakah suatu hipotesa diterima atau ditolak, dimana :

- $H_0$  ;  $b = 0$  ; berarti tidak ada hubungan antara pendapatan sektor perikanan dengan PDRB Kabupaten Maluku Tengah.
- $H_0$  ;  $b \neq 0$  ; berarti ada hubungan antara sektor perikanan dengan PDRB Kabupaten Maluku Tengah

Untuk menguji signifikansinya maka dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- $t_{hitung} < t_{tabel}$ ,  $H_0$  diterima.
- $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $H_0$  ditolak.

Selain dengan menggunakan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel, untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independent dapat dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas antara lain :

- jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima
- jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

Hipotesis yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah :

- $H_0$  : koefisien regresi tidak signifikan
- $H_1$  : koefisien regresi signifikan

## Analisis Sektor Unggulan (LQ).

Dalam penelitian ini penggunaan metode LQ untuk menganalisis apakah sektor perikanan merupakan sektor ekonomi unggulan pada PDRB Kabupaten Maluku Tengah dari tahun 2007-2011. Formulasi rumus sebagai berikut (Budiharsono, 2005):

$$LQ_i = (T_i / T_t) / (V_i / V_t)$$

Keterangan:

$LQ_i$  : Location Quatient

$T_i$  : Pendapatan sektor perikanan Kabupaten Maluku Tengah.

$T_t$  : PDRB dari keseluruhan sektor Kabupaten Maluku Tengah.

$V_i$  : Pendapatan untuk sector perikanan di Provinsi Maluku.

$V_t$  : PDRB untuk keseluruhan sektor Provinsi Maluku.

Kriteria Pengukuran LQ menurut Setiono (2011):

$LQ > 1$  : Berarti sektor tersebut merupakan sektor unggulan didaerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah, maka dapat dianggap bahwa produksi lokal pada sektor bersangkutan relatif lebih tinggi dari pada produksi rata-rata wilayah acuan

$LQ < 1$  : Berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah, maka dapat dianggap bahwa produksi lokal pada sektor bersangkutan relatif lebih rendah dari pada produksi rata-rata wilayah acuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Maluku Tengah merupakan wilayah yang berkarakteristik kepulauan. Secara geografis Kabupaten Maluku Tengah terletak antara  $127^{\circ}26'00''$ - $131^{\circ}10'00''$  Bujur Timur dan  $02^{\circ}05'00''$ - $07^{\circ}05'00''$  Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Maluku Tengah diperkirakan sebesar  $275.907 \text{ Km}^2$ , yang terdiri dari luas laut  $264.311,43 \text{ km}^2$  (95,80%) dan luas daratan  $11.595,57 \text{ km}^2$  (4,12%) dengan panjang garis pantai  $1.375,295 \text{ Km}^2$ .

Dari Luas total wilayah daratan  $11.595,57 \text{ km}^2$ , 92,11% terdistribusi di Pulau Seram dan pulau-pulau kecil sekitarnya, diantaranya adalah: Pulau Ambon (3,31%), Pulau Haruku (1,29%), Pulau Saparua dan Nusalaut (1,80%) dan Kepulauan Banda (1,48%). Jumlah pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 49 buah, 14 buah diantaranya berpenghuni, sedangkan yang tidak dihuni sebanyak 35 buah (Badan Pusat Statistik Maluku Tengah, 2012).

Perkembangan produksi perikanan dalam kurun waktu 2007-2011 secara umum mengalami fluktuasi (Tabel 2). Untuk volume produksi secara keseluruhan pada tahun 2007 sebesar 88.153 ton kemudian mengalami peningkatan menjadi 104.661,5 ton pada tahun 2008. Namun pada tahun 2009 volume produksi mengalami penurunan sebesar 72.610,4 ton, dan pada tahun 2010-2011 jumlah produksi mengalami peningkatan hingga 96.292 ton. Hal yang sama juga terjadi pada nilai produksi perikanan itu sendiri. Pada tahun 2008 dimana volume produksi perikanan mengalami titik tertinggi sebesar 325.381.431 juta dalam kurun waktu lima tahun (2007-2011). Namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya sehingga nilai produksi hanya sebesar 160.674.330 juta. Namun pada tahun 2010-2011 nilai produksi meningkat sebesar 244.960.513,4 juta dan 316.064.169,6 juta.

Tabel 2. Jumlah produksi dan nilai produksi

Tahun	Perikanan Laut		Perikanan Darat		Jumlah	
	V (ton)	N (Rp. 000)	V (ton)	N (Rp. 000)	V (ton)	N (Rp. 000)
2007	86.086,0	237.736.153	2.067,0	31.996.058	88.153,0	269.732.210
2008	101.826,4	271.978.656	2.835,1	53.402.775	104.661,5	325.381.431
2009	72.202,7	154.400.475	407,7	6.273.855	72.610,4	160.674.330
2010	82.971,1	231.734.975	343,8	13.225.538,3	83.314,9	244.960.513,4
2011	95.01,2	299.924.650	890,8	16.139.519,6	96.292,0	316.064.169,6

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah 2011

### Hubungan Pendapatan Sektor Perikanan Dengan PDRB Kabupaten Maluku Tengah

Untuk mengukur hubungan antara pendapatan sektor perikanan dengan PDRB Kabupaten Maluku Tengah selama kurun waktu lima tahun (2007-2011) data *time series* yang digunakan adalah data statistik PDRB Kabupaten Maluku Tengah menurut lapangan usaha atas dasar konstan 2000.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan sektor perikanan mengalami peningkatan setiap tahunnya (Tabel 3). Pada tahun 2007 pendapatan sektor perikanan sebesar Rp.29.198,04 juta kemudian mengalami peningkatan 4,55% pada tahun 2008 sebesar Rp.30.527,11 juta. Pada tahun 2009 meningkat 4,62% menjadi Rp. 31.937,46 juta, dan pada tahun 2010 kembali meningkat 8,76% menjadi Rp. 34.735,18 juta. Pada akhir tahun analisis (2011) pendapatan sektor perikanan mengalami peningkatan sebesar 3,27% menjadi Rp 35.871,02 juta.

Peningkatan pendapatan juga terjadi pada PDRB Kabupaten Maluku Tengah (tabel 3). Pada tahun 2007 total PDRB sebesar Rp.533.548,26 Juta. Pada tahun 2008 total PDRB mengalami peningkatan sebesar 4,17% dari tahun sebelumnya menjadi Rp.555.797,22 juta, tahun 2009 meningkat 5,02% dari tahun sebelumnya menjadi Rp.583.689,67 juta, pada tahun 2010 total PDRB mengalami peningkatan paling tinggi yaitu 10,74% dengan nilai total PDRB sebesar Rp.646.404,45 juta, dan pada tahun 2011 total PDRB hanya mengalami peningkatan sebesar 3,22% menjadi Rp. 667.188,02 juta.

Tabel 3. Pendapatan sektor perikanan dan total PDRB Kabupaten Maluku Tengah tahun 2007-2011.

Tahun	Pendapatan Sektor Perikanan Kab Maluku Tengah	PDRB Kab Maluku Tengah	Peningkatan Pendapatan Sektor Perikanan Kab Maluku Tengah (%)	PDRB Kab Maluku Tengah (%)
2007	29.198,04	534.169,02	0	0
2008	30.527,11	561.764,23	4,55	4,17
2009	31.937,46	591.470,04	4,62	5,02
2010	34.735,18	621.692,54	8,76	10,74
2011	35.871,02	662.334,70	3,27	3,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah 2011, (diolah)

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan linier antara pendapatan sektor perikanan dan total PDRB Kabupaten Maluku Tengah. Hasil analisis statistik menunjukkan nilai r antara pendapatan sektor perikanan dengan total PDRB Kabupaten Maluku Tengah adalah 0,986. Nilai

tersebut bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan sektor perikanan dan memiliki suatu hubungan positif dengan total PDRB Kabupaten Maluku Tengah. Nilai koefisien korelasi ( $r$ ) sektor perikanan 0,8-1 sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan sektor perikanan berkorelasi kuat dengan total PDRB Kabupaten Maluku Tengah. Dilihat dari nilai probabilitas yang besarnya  $0,002 < 0,1$  (taraf kepercayaan 90%), sehingga dapat disimpulkan pendapatan sektor perikanan signifikan atau berpengaruh nyata terhadap total PDRB Kabupaten Maluku Tengah.

Dari analisa regresi dapat diketahui pula persamaan regresi antara pendapatan sektor perikanan dengan PDRB Kabupaten Maluku Tengah adalah:  $Y = 21870,458 + 0,986 X$ . Dari persamaan regresi diperoleh konstanta sebesar 21870,458, artinya bahwa jika tidak ada pemasukan pendapatan dari sektor perikanan maka total PDRB Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar Rp. 21.870.458. Sedangkan koefisien regresi sebesar 0,986, menyatakan bahwa setiap penambahan 1 rupiah dari pemasukan pendapatan sektor perikanan maka akan dapat meningkatkan total PDRB Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp.0,986.

Untuk mengetahui hubungan /pengaruh dari pendapatan sektor perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Maluku Tengah maka dilakukan uji regresi sederhana yang meliputi uji  $R^2$ , uji  $F$  dan uji  $t$  sebagai berikut.

- *Uji koefisien determinasi majemuk ( $R^2$ )*

Nilai koefisien determinasi majemuk ini dalam perhitungan tidak akan dapat mencapai 1 atau 100 % karena tidak semua variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, hal ini disebabkan oleh faktor di luar model yang tidak masuk kedalam model dan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia.

Berdasarkan output regresi tabel Model Summary  $R$  square diperoleh sebesar 0,973. nilai tersebut menunjukkan bahwa 97,3 % nilai PDRB dipengaruhi oleh pendapatan sektor perikanan sedangkan sisanya atau 3,3 % PDRB dipengaruhi oleh sektor lain yang tidak termasuk dalam model.

- *Uji F*

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya peranan variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat atau untuk menilai kebaikan suatu model.

Adapun hipotesa yang digunakan dalam uji  $F$  adalah:

$H_0$ : Diduga pendapatan sektor perikanan tidak berpengaruh nyata terhadap total PDRB Kabupaten Maluku Tengah

$H_1$ : Diduga pendapatan sektor perikanan berpengaruh nyata terhadap total PDRB Kabupaten Maluku Tengah

Dari uji Anova ( $F$  test) pada output analisa regresi, diketahui bahwa nilai  $F$  hitung adalah sebesar 107,123 dan  $F$  tabel adalah 10.13 dengan tingkat signifikansi 0,002 berdasarkan nilai  $F$  tersebut diketahui bahwa nilai  $F$  hitung  $> F$  tabel dan probabilitas  $0,002 < 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, berarti nilai pendapatan sektor perikanan berpengaruh nyata terhadap nilai total PDRB Kabupaten Maluku Tengah.

- *Uji t*

Pengujian ini dilakukan untuk menguji hubungan regresi secara parsial yaitu untuk melihat keberartian dari masing-masing variabel bebas secara parsial

terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan t tabel.

Hipotesa yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

H0: Diduga pendapatan sektor perikanan tidak berpengaruh nyata terhadap total PDRB Kabupaten Maluku Tengah

H1: Diduga pendapatan sektor perikanan berpengaruh nyata terhadap total PDRB Kabupaten Maluku Tengah

Dari hasil output analisa regresi diketahui bahwa nilai t hitung adalah 10,350 dan nilai t tabel adalah 3,182. Berdasarkan nilai t tersebut diketahui bahwa  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  dengan demikian data disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima atau pendapatan sektor perikanan berpengaruh nyata terhadap nilai total PDRB Kabupaten Maluku Tengah.

### LQ sektor perikanan indikator PDRB

Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk melihat potensi daerah adalah *Location Quotien* (LQ). Konsep *Location Quotien* digunakan untuk mengetahui suatu sektor pada wilayah tertentu merupakan sektor ekonomi unggulan. Analisa ini digunakan untuk mengetahui apakah pendapatan sektor perikanan di Kabupaten Maluku Tengah merupakan sektor ekonomi unggulan dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Maluku Tengah.

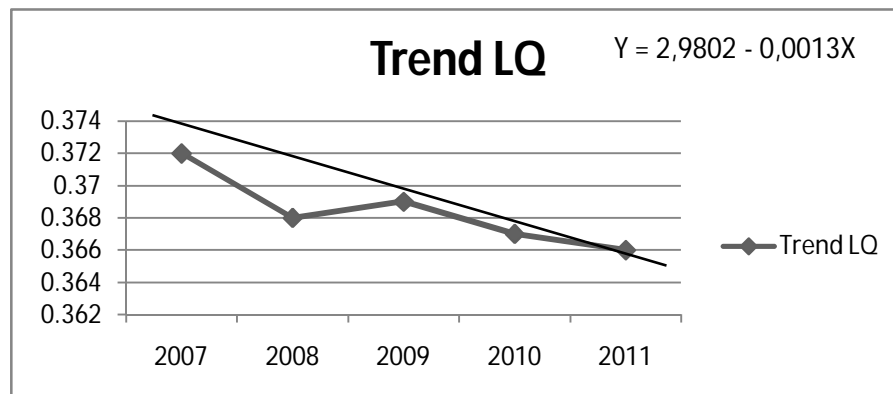
Dari hasil analisis, nilai LQ sektor perikanan dari tahun 2007-2011 berdasarkan indikator PDRB harga konstan 2000 (tabel 4) menunjukkan bahwa setiap tahun analisis sektor perikanan bukan merupakan sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Maluku Tengah. Dikarenakan hasil analisis LQ setiap tahunnya menunjukkan nilai  $LQ < 1$ . Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi geografis. Dimana perairan Kabupaten Maluku Tengah yang wilayah lautannya lebih luas dari daratan belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan sumberdaya perikanan yang terkandung didalamnya.

Tabel 4. LQ sektor perikanan berdasarkan indikator PDRB harga konstan 2000 Tahun 2007-2011

Tahun	Pendapatan Sektor Perikanan Kab Maluku Tengah	PDRB Kab Maluku Tengah	Pendapatan Sektor Perikanan Prov Maluku	PDRB Prov Maluku	LQ
2007	29.198,04	534.169,02	534.169,02	3.633.475,13	0,372
2008	30.527,11	561.764,23	561.764,23	3.766.145,92	0,368
2009	31.937,46	591.470,04	591.470,04	3.992.788,03	0,369
2010	34.735,18	621.692,54	621.692,54	4.251.356,30	0,367
2011	35.871,02	662.334,70	662.334,70	4.507.336,14	0,366

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah 2011. (diolah)





Gambar 1. Tren LQ sektor perikanan berdasarkan indikator PDRB tahun 2007-2011

Tren LQ sektor perikanan dengan persamaan  $Y = 2,9802 - 0,0013X$  (gambar 1) cenderung menurun. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan sektor perikanan tidak disertai peningkatan kapasitas produksi, baik itu sarana prasarana serta sumberdaya yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Selain itu masi bayak kekurangan dari segi kebijakan pemerintah dan program yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah untuk membangun sektor perikanan, yakni:

1. Lemahnya pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang optimal, efisien dan berkelanjutan.
2. Kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.
3. Belum diterapkannya penggunaan IPTEK yang ramah lingkungan dan manajemen profesional pada setiap mata rantai usaha bidang kelautan dan perikanan.
4. Jaringan ekonomi yang lemah.
5. Lemahnya sistem informasi kelautan dan perikanan.
6. Lemahnya pengawasan, pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga terjadi degradasi ekosistem pesisir dan laut.
7. Lemahnya kualitas dan kurangnya kuantitas sumber daya manusia dibidang kelautan dan perikanan.
8. Lemahnya sistem dan mekanisme hukum serta kelembagaan daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah, 2011).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Hubungan korelasi antara pendapatan sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah adalah positif (0,986) dan berpengaruh nyata atau signifikan pada 0,002.
2. Analisis regresi menunjukkan persamaan  $Y = 21870,458 + 0,986 X$ , uji regresi, baik uji  $R^2$ , F, dan t yang kesemuanya menunjukkan pendapatan sektor perikanan berpengaruh nyata terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah.
3. Sektor perikanan di Kabupaten Maluku Tengah bukan merupakan sektor ekonomi unggulan, dengan perkembangan nilai  $LQ < 1$  dengan tren yang menurun pada tahun terakhir analisis (tahun 2011).

## **Saran**

1. Kabupaten Maluku Tengah yang wilayahnya didominasi oleh laut, namun pendapatan yang dihasilkan dari sektor perikanan tidak besar bagi pembangunan wilayah di Kabupaten Maluku Tengah dari tahun ke tahun, hal ini mengharuskan pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait lainnya untuk melihat dan memperhatikan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada khususnya pada sektor perikanan.
2. Pemerintah daerah harus banyak melakukan evaluasi dan program-program baru disamping terlebih dahulu melakukan penelitian terkait dengan pengembangan apa yang hendak dilakukan, karena pemerintah daerah yang merencanakan, merancang, sampai menetapkan apa yang harus dikembangkan untuk pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tengah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiharsono, S. 2005. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Pradnya Paramita, Jakarta. 558 hlm.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. 2012. Maluku Tengah Dalam angka 2012. Masohi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. 2011. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maluku Tengah Menurut Lapangan Usaha. Katalog BPS: 9302001.8103. Masohi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah. 2011. Laporan Tahunan Statistik Perikanan Tahun 2011. Ambon.
- Riduwan dan Sunarto. 2007. Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis. Alfabeta. Bandung. 369 hlm.
- Sutiardi E. 2001. Peranan Sub Sektor Perikanan Terhadap Pembangunan Wilayah di Kota Bengkulu. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, Bogor.

## **PERTANYAAN**

- Strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi?
- Pada data sekunder dalam waktu 5 tahun. Sektor perikanan di bidang yang berpengaruh?

## **JAWABAN**

- Strategi yang digunakan adalah program budidaya di Pulau Bandar dengan cara memusatkan produksi ke himpunan-himpunan nelayan serta adanya bantuan dari pemerintah yang membeli produk tersebut.
- Sektor perikanan secara keseluruhan memiliki pengaruh tetapi yang paling dominan berpengaruh adalah sektor perikanan laut/perikanan tangkap.

## MEMANFAATKAN PELUANG BONUS DEMOGRAFI DALAM MEMBANGUN EKONOMI BIRU PERIKANAN INDONESIA

*Azis Nur Bambang<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>FAkultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Sudharto, Tembalang, Semarang. Telp/fax:247474698  
Alamat korespondensi: *aziz\_undip2013@yahoo.com*

### ABSTRAK

Indonesia akan menghadapi sebuah event besar tantangan menuju tahapan bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2020 hingga 2030. Bonus demografi ini bisa dijadikan dasar meningkatkan produktivitas guna memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam secara lestari. Terjadinya jumlah penduduk produktif yang lebih besar, dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Dalam memasuki perdagangan bebas dunia, agar Indonesia tidak kalah bersaing dan bonus demografi tidak menjadikan masalah, maka diperlukan peningkatan SDM melalui pendidikan bermutu dan layanan kesehatan, serta mencetak pelaku usaha baru dengan terus menotivasi tumbuhnya wirasusaha muda dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, maka penyediaan dan pemenuhan pangan harus dilakukan. Sumberdaya ikan yang potensial dan keragaman hayati yang sangat kaya di negara kita dan belum dimanfaatkan secara optimal. Perdagangan bebas dan *Free Trade Area* akan menciptakan *global economic connectivity* dan *borderless state*. Asia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di dunia sehingga posisi Indonesia yang strategis akan mendapatkan keuntungan. Diperkuat dengan meningkatnya kesadaran terhadap *green economy* memberikan peluang Indonesia khususnya sebagai negara penyuplai pangan dunia. Ekonomi Indonesia yang mengarah ke *green economy* dan *blue economy* akan menjadikan penggunaan sumber daya alam yang terbatas dengan lebih efisien dan efektif. Konsep *blue economy* yang dirancang dengan memaksimalkan potensi perikanan dan kelautan dalam pembangunan nasional --terutama industrialisasi kelautan dan perikanan -- memperkenalkan konsep *zero waste*. Limbah-limbah hasil produk perikanan kelautan diupayakan dapat memberi *value added* menjadi barang yang lebih ekonomis.

**Kata kunci:** peluang, bonus demografi, ekonomi biru, perikanan

### PENDAHULUAN

Bonus demografi adalah keadaan dimana jumlah penduduk produktif (15 - 64 tahun) lebih besar atau sekitar 70% dibandingkan jumlah penduduk muda (dibawah 15 tahun) dan lanjut usia (65 tahun keatas) atau tidak produktif sebesar 30%. Bonus demografi dapat dijadikan dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Saat tingkat fertilitas (jumlah kelahiran sepanjang hidup perempuan) turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan.

Indonesia akan mendapatkan bonus demografi selama 10 tahun antara tahun 2020 – 2030 Saat itu, proporsi anak berusia kurang dari 15 tahun terus berkurang dibandingkan dengan penduduk usia kerja, 15-64 tahun. Pada periode 2020 - 2030 inilah yang disebut sebagai fase *window of opportunity* (Gambar 1), yaitu jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa di masa

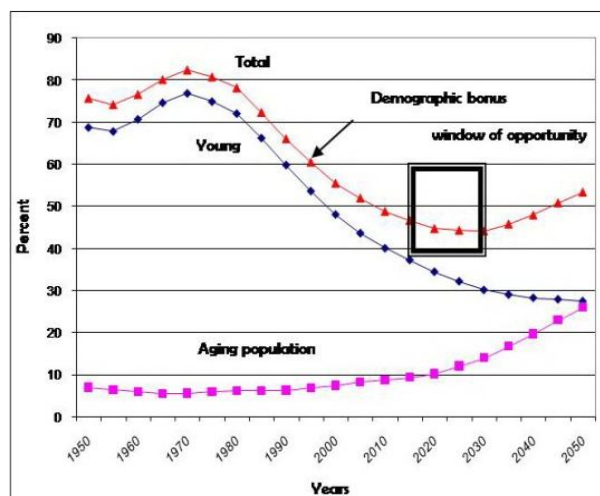
depan melalui *saving* yang dilakukan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2013).

Jumlah penduduk usia muda yang sedikit, bisa dimanfaatkan dengan mengalihkan dana yang seharusnya untuk membiayai anak-anak yang awalnya banyak, ke arah peningkatan mutu manusia. Jumlah penduduk usia produktif yang melimpah, menjadi sumber peningkatan produktivitas penduduk dan dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan per kapita.

Jendela peluang tersebut bisa menjadi kenyataan jika memenuhi beberapa syarat yakni pertama sumber daya manusianya berkualitas dan yang kedua bisa terserap di pasar kerja. Ketiga adanya tabungan rumah tangga dan yang keempat meningkatnya porsi perempuan dalam pasar kerja. Keempat persyaratan tersebut, harus terpenuhi agar peningkatan kelompok usia muda bisa menjadi peluang bagi keberlanjutan pembangunan (BKKBN, 2013). Jika tidak dibekali pendidikan berkualitas, kesehatan, keterampilan dan kompetensi yang memadai serta lapangan pekerjaan yang banyak tersedia, maka jumlah usia produktif yang besar justru akan menjadi ancaman bagi negara karena tidak dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

### **Memanfaatkan peluang**

Pada tahun 2020 - 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 60 juta jiwa, atau 10 orang usia produktif hanya menanggung 3 - 4 orang usia tidak produktif, sehingga akan terjadi peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan nasional. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia, dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi, peningkatan SDM-nya melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi. Bonus demografi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bisa dilihat bangsa-bangsa yang maju saat ini adalah bangsa-bangsa yang pemudanya berhasil memanfaatkan bonus demografi tersebut. Jepang, yang saat ini sudah mengalami kemunduran demografi, karena para pemudanya sudah tak sebanyak dulu, (para penduduk usia produktifnya sudah akan memasuki masa pensiun), adalah salah satu negara maju yang berhasil memanfaatkan hal tersebut.



Gambar 1. Perkiraan Window of Opportunity di Indonesia. (Sumber: Aris Ananta, 2013)

## Membangun ekonomi biru perikanan

Dalam membangun sosial-ekonomi perikanan Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengedepankan empat pilar strategi pembangunan sosial-ekonomi, yaitu *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-environment*. Pembangunan ekonomi yang memperhatikan lingkungan (*pro-environment*) merupakan sebuah model pendekatan ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem.

Tabel 1. Penerapan konsep *Blue Economy*

No	Kegiatan ekonomi	Hasil/ produk
1	Pengolahan hasil perikanan dari beberapa komoditas hasil laut	ikan kaleng, ikan beku, tepung ikan, minyak ikan, makanan ternak, kulit samak, gelatin, dan kerajinan.
2	Pengolahan Udang	Menghasilkan daging udang, limbah udang diproses menghasilkan khitin dan khitosan. Khitin menghasilkan berbagai produk seperti: bahan untuk fotografi, kertas, farmasi, kosmetik, pengolahan dan pengawetan kayu, dan lain sebagainya
3	Penangkapan ikan hemat bahan bakar	BBM diganti dengan energi surya, angin, dan arus; hasilnya efisiensi biaya penangkapan, mengurangi eksternalitas <i>over fishing</i> dan pencemaran perairan
4	Budi daya perikanan hemat pakan	Menghemat biaya pakan, mengurangi ketergantungan bahan pakan impor, menghasilkan ikan alami dari sistem budidaya dengan memanfaatkan tropik level.
5	Pengolahan limbah produksi pengolahan ikan	Menghasilkan <i>value added</i> , bahan untuk campuran pakan ikan, bahan pupuk organik

Sumber : diolah penulis dari berbagai informasi di Internet.

Ekonomi biru, menurut Pauli (2010), merupakan pendekatan baru bahwa aktivitas ekonomi harus inovatif, nirlimbah (tanpa limbah), membuka banyak lapangan kerja untuk orang miskin, dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Implementasi ekonomi biru di sektor Kelautan dan Perikanan membutuhkan *cutting-edge innovations* yang tidak hanya mampu memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, tetapi lebih konkrit inovasi sistem produksi bersih tanpa limbah.

Pendekatan Ekonomi Biru dikembangkan untuk mendorong peningkatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi pro lingkungan melalui pengembangan bisnis dan investasi inovatif dan kreatif. Tujuannya tidak lain menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang semakin luas dan pendapatan masyarakat meningkat, namun langit dan laut tetap biru.

Kalau ekonomi biru merupakan suatu pendekatan sistem pembangunan ekonomi yang sudah mulai banyak dilakukan di beberapa negara termasuk

Indonesia, maka industrialisasi perikanan merupakan strategi pembangunan perikanan yang tepat, keduanya bisa dipadukan menjadi industrialisasi perikanan berparadigma ekonomi biru

Konsep *Blue Economy* dikembangkan untuk menjawab tantangan, bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. Konsep *Blue Economy* dimaksudkan untuk menantang para entrepreneur bahwa *Blue Economy Business Model* memberikan peluang untuk mengembangkan investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan; menggunakan sumberdaya alam lebih efisien dengan menghasilkan lebih banyak produk turunan dan produk lain terkait, sehingga menghasilkan revenue lebih besar dan tidak merusak lingkungan; sistem produksi lebih efisien dan bersih; menghasilkan produk dan nilai ekonomi lebih besar; meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memberikan kesempatan untuk memberikan benefit kepada setiap kontributor secara lebih adil (Syarif, 2013).

### **Konsep zero waste**

Pembangunan perekonomian bisa dimulai dari konsep zero waste, dimana memanfaatkannya limbah-limbah hasil produk dengan meningkatkan atau memberi value added pada limbah tersebut sehingga menjadi barang yang lebih ekonomis. Namun, proses tersebut juga harus dengan tetap mempertimbangkan lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial, maupun lingkungan alam

Menurut Syarif (2013), kebijakan pembangunan perikanan dengan mengadopsi prinsip *Blue Economy* akan mendorong pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan semakin efisien dengan produk lebih banyak dan bervariasi, bernilai tambah tinggi, dan sekaligus melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran.

Inovasi dengan menciptakan aktivitas penangkapan ikan hemat bahan bakar telah dilakukan di Maroko. Sistem penangkapan menggunakan bahan bakar minyak, telah diganti dengan energi surya, angin, dan arus. Ini penting seiring situasi meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang membuat (2,7 juta) nelayan sering mengalami kerugian.

Kedua, bagaimana mengembangkan budi daya perikanan hemat pakan. Saat ini pakan merupakan komponen besar dalam struktur biaya produksi budi daya. Dan, pakan tersebut kandungan impornya sangat tinggi. Bila ini berhasil, maka akan membantu 3,3 juta pembudi daya ikan, sekaligus menurunkan ketergantungan impor. Di Afrika Selatan sudah mulai dengan memanfaatkan *maggot* sebagai sumber proteinnya.

Lebih baik lagi bila dikembangkan budi daya tanpa pakan dengan memperhatikan *trophic level* spesies-spesies di dalamnya. Ketiga, mendorong pemanfaatan limbah unit pengolahan ikan (UPI). Seperti, saat ini peneliti Institut Pertanian Bogor sudah mulai memanfaatkan limbah industri pengolahan ikan lemuru untuk dijadikan unsur dalam pakan ayam agar melahirkan telur ayam omega-3.

Di Kagoshima, Jepang, limbah UPI sebagian dijadikan pakan ikan, dan sisa tulang ikannya dijadikan komponen untuk pupuk organik. Artinya, limbah industri menjadi bahan baku untuk industri lainnya. Keempat, pengembangan pulau-pulau kecil, baik untuk mandiri energi maupun wisata bahari prorakyat.

## Peningkatan kapasitas SDM;

Masalah kependudukan dan pembangunan adalah masalah dasar dalam menyediakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia untuk generasi sekarang dan mendatang. Dinamika kependudukan berupa jumlah, struktur umur, pertumbuhan, kualitas dan persebaran harus terintegrasi dengan baik dalam kebijakan dan strategi pembangunan nasional karena penduduk dan perencanaan pembangunan saling mempengaruhi satu dengan lainnya secara timbal balik. Penduduk harus dikembangkan agar menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas melalui program kependudukan yang komprehensif (Aris Ananta, 2013).

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadikan sustainable development yang terkandung di dalam paradigma Blue Economy menjadi orientasi baru di dalam pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan pembangunan kelautan dan perikanan (Syarif, 2013).

Pendidikan merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia semata, tetapi sangat strategis bagi konservasi keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan.

Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pengembangan industri kelautan dan perikanan yang inovatif berbasis *blue economy* dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Dukungan kegiatan pendidikan dilakukan melalui akses pendidikan bagi anak pelaku utama di satuan pendidikan lingkup KKP dan SMK kelautan dan perikanan di luar KKP (Tabel 2), serta dukungan biaya pendidikan bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan, yaitu nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam. Anak pelaku utama tersebut direkrut tanpa tes untuk bersekolah di satuan pendidikan KKP. Mereka dididik dengan menggunakan sistem pendidikan vokasi melalui pendekatan *teaching factory* dengan kawasan minapolitan sebagai lokasi kegiatan, berbasis industrialisasi kelautan dan perikanan, dan penerapan kaidah-kaidah *blue economy*. Pendidikan ini menghasilkan lulusan berupa SDM terdidik dan kompeten yang mempunyai kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan sektor kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Tabel 2. Daftar satuan pendidikan lingkup KKP

No	Nama	Lokasi
1	Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta	Pasar Minggu Jakarta
2	Akademi Perikanan (AP)	Bitung, Sorong
3	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)	Ladong, Pariaman, Kota Agung, Tegal, Pontianak, Bone, Ambon, Kupang, Sorong

## **Peningkatan produksi kelautan dan perikanan;**

Menurut Yusuf (2013), untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, maka penyediaan dan pemenuhan pangan harus dilakukan. Pemenuhan pangan harus dilakukan dengan cara meningkatkan produksi dan produktivitasnya melalui intensifikasi (bukan ekstensifikasi), diversifikasi konsumsi melalui pengembangan pangan lokal, peningkatan daya saing, dan menurunkan kehilangan paska panen dan *value-chain*.

Pangan lokal dikembangkan karena Indonesia memiliki keragaman hayati yang sangat kaya dan belum dimanfaatkan secara optimal. Keanekaragaman tersebut mencakup tingkat ekosistem, tingkat jenis, dan tingkat genetik, yang melibatkan makhluk hidup beserta interaksi dengan lingkungannya.

Produsen pangan nasional sudah saatnya menghidupkan kembali sumber-sumber pangan lokal untuk menghentikan kemerosotan keragaman varietas jenis pangan yang dibudidayakan oleh petani. Apabila kondisi ini terus dikembangkan di seluruh wilayah nusantara, maka kemampuan nasional untuk meningkatkan produksi pangan pasti akan meningkat sekaligus menghindarkan ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu.

Perdagangan bebas dan *Free Trade Area* akan menciptakan *global economic connectivity* dan *borderless state*. Asia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di dunia sehingga posisi Indonesia yang strategis akan mendapatkan keuntungan. Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik.

Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar US\$ 82 miliar per tahun. Potensi tersebut meliputi: potensi perikanan tangkap sebesar US\$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US\$ 46,7 miliar per tahun, potensi peraian umum sebesar US\$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US\$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US\$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US\$ 4 miliar per tahun (DKP, 2005).

Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), yang terbagi dalam Sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi atau 91,8% dari JTB. Sedangkan dari sisi diversivitas, dari sekitar 28.400 jenis ikan yang ada di dunia, yang ditemukan di perairan Indonesia lebih dari 25.000. Di samping itu terdapat potensi pengembangan untuk (a) perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta ha dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun, (b) budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kekerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut, (c) budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha, (d) budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan minapadi di sawah, serta (e) bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan.



Produksi perikanan tahun 2012 yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya mencapai 15,26 juta ton. Dari total produksi tersebut, perikanan budidaya menyumbang 9.45 juta ton (61,92%) dan perikanan tangkap sebesar 5.81 juta ton (38,08%). Laju pertumbuhan rata-rata produksi perikanan sejak tahun 2008 mencapai 14,62% per tahun, dimana pertumbuhan budidaya sebesar 25,24% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perikanan tangkap yang hanya sebesar 3,83% per tahun. Perkembangan produksi perikanan selama tahun 2008-2012 dalam volume sebagaimana tabel berikut (LAKIP KKP, 2013):

Tabel 3. Perkembangan produksi tahun 2008-2012

Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-rata (%)
	2008	2009	2010	2011	2012*)	
<b>Volume Produksi</b>	<b>8.858.315</b>	<b>9.816.534</b>	<b>11.662.342</b>	<b>13.643.234</b>	<b>15.263.210</b>	<b>14,62</b>
<b>Perikanan Tangkap</b>	<b>5.003.115</b>	<b>5.107.971</b>	<b>5.384.418</b>	<b>5.714.271</b>	<b>5.811.510</b>	<b>3,83</b>
• Perikanan Laut	4.701.933	4.812.235	5.039.446	5.345.729	5.438.150	3,72
• Perairan Umum	301.182	295.736	344.972	368.542	373.360	5,75
<b>Perikanan Budidaya</b>	<b>3.855.200</b>	<b>4.708.563</b>	<b>6.277.924</b>	<b>7.928.963</b>	<b>9.451.700</b>	<b>25,24</b>
• Budidaya Laut	1.966.002	2.820.083	3.514.702	4.605.827	5.596.932	30,16
• Budidaya Payau	959.509	907.123	1.416.038	1.602.748	1.790.602	18,89
• Budidaya Tawar	929.689	981.357	1.347.184	1.720.388	2.064.166	22,63

Sumber: LAKIP KKP, 2013. Ket:\*) = Angka Sementara

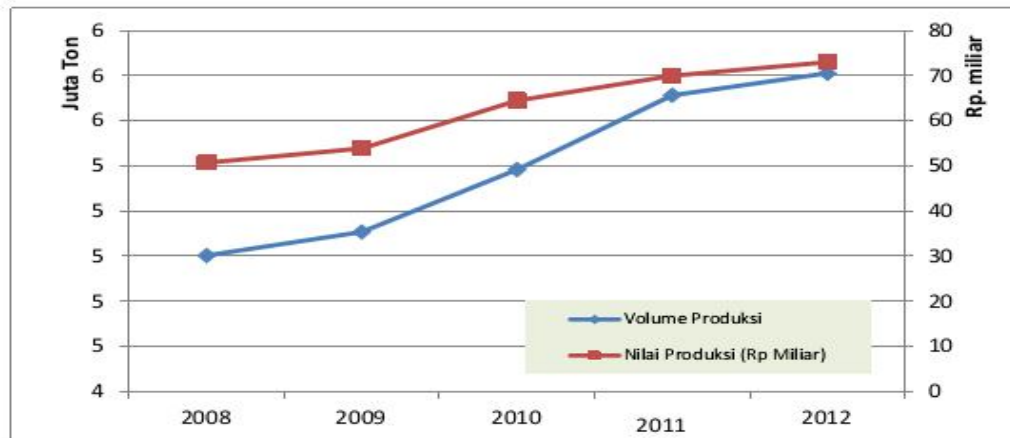
Laporan Food Agricultural Organization (FAO) tahun 2012 menunjukkan bahwa produksi ikan dunia dari kegiatan penangkapan di laut maupun di perairan umum cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 90 juta ton pada tahun 2006 menjadi 90,4 juta ton pada tahun 2011. Sementara di sisi lain, produksi ikan dari kegiatan budidaya mengalami peningkatan cukup pesat dari 47,3 juta ton menjadi 63,6 juta ton pada periode yang sama.

Di sisi lain, potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap laut Indonesia sekitar 6,5 juta ton/tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,03 juta ton pada tahun 2011 atau 77,38%. Pemanfaatan sumberdaya perikanan laut tersebut, di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) tertentu seperti Laut Jawa, telah terjadi *over fishing*. Sementara di perairan lainnya seperti Laut Cina Selatan, Arafura dan lain sebagainya, potensi ikannya belum dimanfaatkan secara optimal (Syarif, 2013).

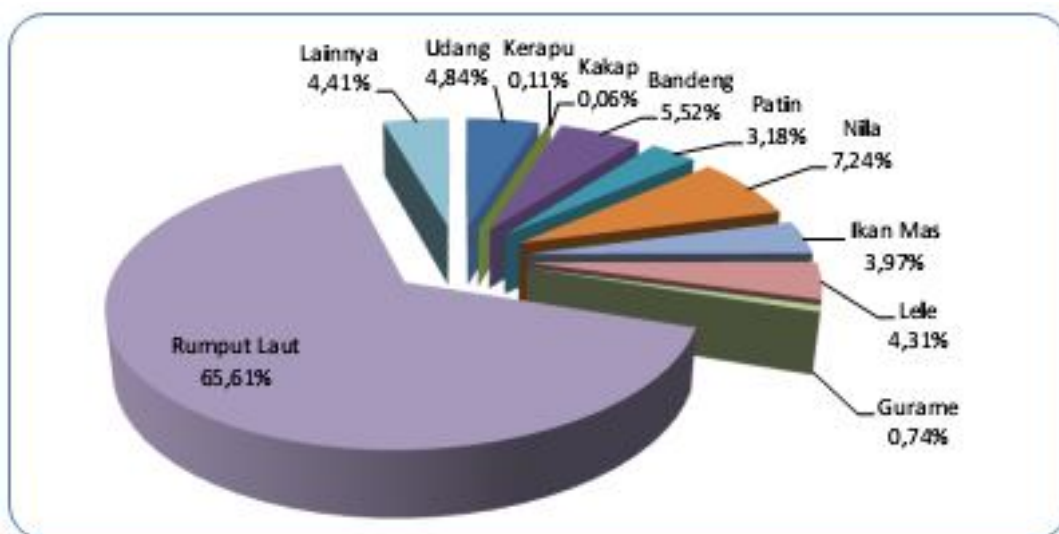
Potensi perikanan budidaya payau atau tambak mencapai 2,96 juta hektar dan baru dimanfaatkan seluas 682.857 hektar (23,04%) serta potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar dengan tingkat pemanfaatan yang relatif masih rendah, yaitu sekitar 117.649 hektar atau 0,94%. Potensi perikanan budidaya ini akan semakin besar, apabila kita memasukan potensi budidaya air tawar seperti kolam 541.100 ha, budidaya di perairan umum 158.125 ha dan mina-padi seluas 1,54 juta ha.

Dalam beberapa tahun terakhir, produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan produksi perikanan tangkap. Sementara pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan pada tahun 2012 mencapai angka 6,48%, dengan nilai nominal sebesar Rp 57,69 triliun.

Ekspor hasil perikanan telah mengarah pada produksi bernilai tambah, dengan pertumbuhan pada periode 2011–2012 sebesar 11,62%, sedangkan nilai impor pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 15,43%. Dengan demikian, neraca perdagangan perikanan pada tahun 2012 mengalami surplus sebesar US\$ 3,52 miliar (Syarif, 2013)



Gambar 2. Grafik Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2008-2012  
Sumber: LAKIP KKP, 2013.



Gambar 3. Grafik Produksi Perikanan Budidaya menurut Komoditas Tahun 2012  
Sumber: LAKIP KKP, 2013

Untuk produk olahan hasil perikanan, dalam kurun waktu setahun terakhir meningkat sebesar 5,39%, yakni dari 4,58 juta ton pada tahun 2011 menjadi 4,83 juta ton pada tahun 2012, atau tercapai 100,56% dari target sebesar 4,8 juta ton. Volume produk olahan ini berdasarkan pada perhitungan ekspor hasil perikanan untuk industri pengolahan skala besar dan total rata-rata Unit Pengolahan Ikan (UPI) per tahun dengan frekuensi kegiatan pengolahan 300 hari kerja per tahun untuk UPI skala UMKM. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra kementerian 2010-2014 sebesar 5,2 juta ton, maka pencapaian pada indikator kinerja ini telah mencapai 92,83%. Sama halnya dengan pertumbuhan pada periode tahun 2012 dengan tahun sebelumnya, selama kurun waktu 2008

sampai 2012, perkembangan volume produk olahan hasil perikanan meningkat rata-rata sebesar 7,12% per tahun.

Tabel 4. Produksi olahan tahun 2008 – 2012

Rincian	Tahun					Kenaikan rata-rata (%)	
	2008	2009	2010	2011	2012	2008-2012	2011-2012
Volume (Juta\ Ton)	3,67	4,04	4,20	4,58	4,83	7,12	5,39

Sumber: LAKIP KKP, 2013. Keterangan: \*) Angka Sementara

### Peluang bonus

Menggunakan data peningkatan dan pengembangan potensi perikanan kelautan yang telah dipaparkan di atas, perlu kiranya memanfaatkan peluang/kesempatan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi di masa yang akan datang. Pertanyaannya, pertama adalah apakah dalam memanfaatkan “*window opportunity*” yang akan datang, kita sudah mempersiapkan segalanya, untuk memperkerjakan atau membuat kesempatan kerja bagi 180 juta penduduk usia produktif ? Kedua, apakah perikanan berbasis *blue economy* bisa meningkatkan kinerja pembangunan dan menyediakan lapangan pekerjaan? Untuk menjawab siap atau bisa tidaknya, kita perlu segera mempersiapkan perencanaan, strategi, kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan dan menyerap tenaga kerja serta menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, baik ekonomi lokal, regional maupun secara nasional.

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain (Syarif, 2013): peningkatan nilai tambah produk perikanan, peningkatan daya saing produk perikanan, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir, penguatan pelaku industri perikanan melalui peningkatan jumlah dan kualitas industri perikanan, kegiatan ekonomi yang berbasis komoditas dan wilayah, serta kegiatan yang tak kalah pentingnya adalah kegiatan ekonomi dan perikanan yang ramah lingkungan (*green economy, blue economy* dan *clean industry*)

Selain itu perlu kiranya program-program pembangunan di bidang perikanan kelautan yang telah ada, dievaluasi dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran secara optimal. Program-program tersebut antara lain: Program Nasional - Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Kelautan dan Perikanan, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), program Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

### KESIMPULAN

Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia, jika pemerintah mulai sekarang telah menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi, melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi.

Penyediaan lapangan dan kesempatan kerja untuk yang akan datang (2020-2030) bisa dicapai dengan membuat berbagai kegiatan peningkatan nilai tambah produk perikanan, peningkatan daya saing produk perikanan, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir, penguatan pelaku industri perikanan melalui peningkatan jumlah dan kualitas industri perikanan dan kegiatan ekonomi yang

berbasis komoditas dan wilayah. Selain itu pendekatan pembangunan ekonomi disarankan menggunakan pendekatan *green economy*, *blue economy* dan *clean industry*

## DAFTAR PUSTAKA

- Aris Ananta, 2013. Mega Trend Demografi. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN. Jakarta
- BKKBN, 2013. Bonus Demografi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.
- DKP, 2005. Renstra Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2005-2009. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Jose Antonio Puppim de Oliveira, Editor, 2012. Green Economy and Good Governance for Sustainable Development: Opportunities, Promises and Concerns. United Nations University Press
- LAKIP KKP 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Pauly, G.A., 2010. The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs. Paradigm Publications. <https://www.google.com/#q=blue+economy>, diakses tgl 1 Oktober 2013
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI.
- Pusat Data Statistik dan Informasi KKP, 2013. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta
- Rakornas KKP, 2013. Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Industrialisasi dengan Pendekatan Ekonomi Biru. Rumusan Rakornas KKP- 19-22 Februari 2013, Jakarta
- Sharif C Sutardjo, 2013. Industrialisasi Berbasis Ekonomi Biru Dorong Penguatan Ekonomi Rakyat. FGD lanjutan implementasi *Blue Economy*, Rakornas KKP-2013, Jakarta.
- Yusuf, 2013. Politik Pangan Indonesia: Ketahanan Pangan Berbasis Kedaulatan dan Kemandirian. Sekretariat Kabinet RI., Jakarta

## PERTANYAAN

- Bagaimana proses *blue economy* jika diterapkan dalam provinsi kepulauan?
- Bagaimana perubahan pola pikir masyarakat untuk membuka usaha sendiri?

## JAWABAN

- Masing-masing pulau pasti memiliki potensi dan potensi tersebut dapat dikembangkan sehingga limbah dapat dimanfaatkan dan produk lokal dapat dikembangkan untuk memiliki nilai ekonomis tinggi.

- Dibutuhkan pendidikan formal dan non formal untuk menuju pola pikir dalam membuka usaha sehingga hasil-hasil cetakan dari pendidikan tersebut dapat ditarik dalam dunia kerja, jadi pendidikan tidak harus formal saja tetapi didukung oleh pelatihan dan lain-lain juga mampu untuk menunjang.

## FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN SEBAGAI PENDUKUNG KEGIATAN USAHA PERIKANAN

*Paundra Oktavian<sup>1</sup>, Amiek Soemarmi<sup>1</sup>, Soni Tri Julianto<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro

*Alamat korespondensi: paundra\_penyet@yahoo.co.id*

### ABSTRAK

Pelabuhan Perikanan memiliki peranan penting, karena Pelabuhan Perikanan salah satu penyedia fasilitas terlengkap yang diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha disektor perikanan. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan arti dari sebuah pelabuhan perikanan. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan menjadi, Pelabuhan perikanan tipe A (samudera), Pelabuhan perikanan tipe B (nusantara), Pelabuhan perikanan tipe C (pantai), Pelabuhan perikanan tipe D (pangkalan pendaratan ikan). Pelabuhan Perikanan mengemban dua fungsi, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan untuk mendukung kegiatan usaha perikanan. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan wewenang kepada Pelabuhan Perikanan untuk mengelola, memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada pelaku kegiatan perikanan di Pelabuhan Perikanan. Pelaksanaan fungsi pemerintahan maupun fungsi pengusahaan mengalami hambatan atau kendala yang berasal dari para pelaku usaha perikanan seperti kurang sadar hukum akan pentingnya surat kelengkapan berlayar maupun kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas perikanan di Pelabuhan Perikanan. Keberhasilan kegiatan perikanan di Pelabuhan Perikanan dari praproduksi sampai pemasaran hasil usaha perikanan dapat dicapai antara lain dengan cara meningkatkan fasilitas yang diperlukan oleh pelabuhan perikanan, meningkatkan hasil tangkapan, peningkatan mutu hasil tangkapan, pengolahan hasil perikanan dan lain-lain yang dapat meningkatkan nilai tambah.

**Kata Kunci:** pelabuhan perikanan, usaha perikanan

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang jumlah wilayah perairannya lebih luas daripada wilayah daratannya transportasi laut merupakan modal yang memegang peranan sangat penting, terutama untuk mengangkut dan mendistribusikan barang antar pulau maupun ekspor dan impor. Mengingat perannya yang begitu besar maka dituntut adanya sistem transportasi yang efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa sistem transportasi tersebut harus mempunyai kapasitas yang mencukupi, terpadu, tertib dan teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat dan aman, nyaman dan biaya terjangkau. Kemudian efisien berarti bahwa sistem transportasi tersebut harus memberikan beban publik yang relatif rendah dan utilitas yang tinggi. Disamping itu juga peranan transportasi laut tidak lepas dari pentingnya sebuah pelabuhan perikanan.

Peranan pelabuhan perikanan semakin penting karena pelabuhan perikanan merupakan salah satu sarana yang menghasilkan pendapatan cukup besar. Program ekspor hasil perikanan dapat dicapai antara lain dengan cara meningkatkan fasilitas yang diperlukan oleh pelabuhan perikanan, meningkatkan hasil tangkapan, peningkatan mutu hasil tangkapan, pengolahan hasil perikanan dan lain-lain yang dapat meningkatkan nilai tambah. Untuk mencapai program

tersebut, perencanaan pelabuhan perikanan yang dirancang tepat dan berfungsi baik sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pembangunan perikanan. Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Tidak serta-merta pelabuhan perikanan mempunyai fungsi dan kewenangan yang sama. Menilik dari problem ini maka pelabuhan mempunyai klasifikasi tersendiri yang membuat sebuah perbedaan antara pelabuhan satu dan yang lain. Minimnya jumlah pelabuhan perikanan Indonesia membuat terhambatnya arus pendistribusian ikan di Indonesia. Jumlah komoditi ikan yang besar tidak sebanding dengan jumlah tempat yang disediakan untuk menampung ikan-ikan nelayan.

### **Pelabuhan perikanan**

Pelabuhan perikanan didefinisikan sebagai suatu paduan dari wilayah perairan, wilayah daratan dan sarana-sarana yang ada di basis penangkapan baik alamiah maupun buatan, dan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya (*Hamim, 1983 : 3*).

Menurut Departemen Pertanian dan Departemen Perhubungan (1996) Pelabuhan Perikanan adalah sebagai tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas didarat dan diperairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

Pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perairan yang tertutup atau terlindungi dan cukup aman dari pengaruh angin dan gelombang, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti logistik, penyediaan bahan bakar, perbengkelan dan juga pengangkutan barang-barang (*Alonze de F. Quin dalam W. J. Guckian, 1970*).

Pelabuhan perikanan adalah daratan perairan yang terlindung terhadap gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut, meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan (*Triatmodjo, 1996*).

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan arti dari sebuah pelabuhan perikanan. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi empat kategori utama yaitu menurut kriteria - kriteria seperti tertera pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tipe dan Kriteria Pelabuhan Perikanan di Indonesia

No.	Tipe Pelabuhan	Kriteria Pelabuhan
1.	Pelabuhan Perikanan samudera (A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedianya lahan seluas 50 Ha</li> <li>✓ Diperlukan bagi kapal-kapal perikanan di atas 100–200 GT dan kapal pengangkut ikan 500–1000 GT</li> <li>✓ Melayani Kapal-kapal perikanan 100 unit/hari</li> <li>✓ Jumlah ikan yang didaratkan lebih dari 200 ton/hari</li> <li>✓ Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana, pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan</li> </ul>
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara (B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedianya lahan seluas 50 Ha</li> <li>✓ Diperlukan bagi kapal-kapal perikanan di atas 100–200 GT dan kapal pengangkut ikan 500–1000 GT</li> <li>✓ Melayani Kapal-kapal perikanan 100 unit/hari</li> <li>✓ Jumlah ikan yang didaratkan lebih dari 200 ton/hari</li> <li>✓ Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana, pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan</li> </ul>
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai (c)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedianya lahan seluas 10 Ha – 30 Ha</li> <li>✓ Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan &lt; 30 GT</li> <li>✓ Melayani kapal-kapal perikanan 25 unit</li> <li>✓ Jumlah ikan yang didaratkan 50 ton per hari</li> <li>✓ Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana, pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan</li> </ul>
4.	Pangkalan pendaratan Ikan (D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedianya lahan seluas 10 Ha</li> <li>✓ Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan &lt; 30 GT</li> <li>✓ Melayani kapal-kapal perikanan 15 unit per hari</li> <li>✓ Jumlah ikan yang didaratkan &gt; 10 ton perhari</li> <li>✓ Dekat dengan pemukiman nelayan</li> </ul>

(Sumber: Direktorat Jendral Perikanan, 1994)

### **Fungsi pelabuhan perikanan**

Secara luas fungsi pelabuhan perikanan adalah dibagi menjadi dua menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, yaitu:



1. Pemerintahan
2. Pengusahaan.

Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.

Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Pembinaan pelayanan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
2. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
3. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
4. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
5. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
6. Pelaksanaan kesyahbandaran;
7. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
8. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
9. Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
10. Pemantauan wilayah pesisir;
11. Pengendalian lingkungan;
12. Kepabebaran; dan/atau
13. Keimigrasian.

Fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Fungsi pengusahaan meliputi:

1. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2. Pelayanan bongkar muat ikan;
3. Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
4. Pemasaran dan distribusi ikan;
5. Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
6. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
7. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
8. Wisata bahari; dan/atau
9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan peranan dari pelabuhan perikanan adalah sebagai tempat untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan, pemasaran dan tempat berlabuh bagi kapal yang mengisi bahan bakar serta persiapan operasi penangkapan (Baskoro, 1984).

Menurut Irwan (2010) fungsi pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan:

1. Tambat labuh kapal perikanan;
2. Pendaratan ikan;
3. Pemasaran dan distribusi ikan;
4. Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
5. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
7. Memperlancar kegiatan operasional perikanan;
8. Pelaksanaan kesyahbandaran.

Di samping itu, pelabuhan perikanan juga mengemban fungsi integrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap, yaitu sebagai:

1. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
2. Tempat pendukung kegiatan budidaya laut;
3. Pelayanan informasi dan Iptek; serta
4. Pelayanan bisnis perikanan dan jasa kelautan.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusaha guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Dalam hal ini dapat dibarkan apa saja fungsi pelabuhan perikanan itu sendiri, sebagai berikut:

1. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2. Pelayanan bongkar muat;
3. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
4. Pemasaran dan distribusi ikan;
5. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
6. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
7. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
8. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
9. Pelaksanaan kesyahbandaran;
10. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
11. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
12. Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
13. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
14. Pengendalian lingkungan.

Agar fungsi dari pelabuhan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maka ditunjuklah seorang Syahbandar di pelabuhan perikanan. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Sesuai dengan fungsinya tugas Syahbandar mengawasi kelaiklautan kapal yang meliputi keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan. Indonesia sebagai negara maritim sepenuhnya menjalankan kedaulatan kebijakan sektor kelautan. Termasuk dalam hal, memfungsikan syahbandar yang ditempatkan di pelabuhan perikanan. Namun keberadaan Syahbandar ini memiliki keunikan tersendiri. Dikarenakan, dunia pelayaran internasional hanya mengakui Syahbandar di pelabuhan umum.

Adapun tugas Syahbandar di pelabuhan perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 42 yaitu :

1. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
2. Mengatur Kedatangan dan keberangkatan Kapal Perikanan;
3. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
4. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat batu penangkapan ikan;
5. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
6. Memeriksa *logbook* penangkapan dan pengangkutan ikan;

7. Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
8. Mengawasi pemanduan;
9. Mengawasi pengisian bahan bakar;
10. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas;
11. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
12. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
13. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
14. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawasan kapal perikanan;
15. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan, dan
16. Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Melihat apa yang telah terjadi dewasa ini maka perlu kiranya ada sebuah sistem yang dibuat untuk tercapainya fungsi pelabuhan yang tepat sasaran dan tepat guna. Dalam sistem pelabuhan dikenal istilah otorita pelabuhan. Penyelenggaraan pelabuhan adalah tugas dan fungsi pemerintahan. Indonesia pernah mempunyai *Port Authority* yang diterjemahkan dalam arti sempit sebagai penguasa pelabuhan yang militeristik (karena dalam keadaan darurat perang), pada tahun 1964 s/d 1969 berdasarkan Perpres Nomor 18 tahun 1964 karena fungsi penguasa pelabuhan mempunyai konotasi yang bersifat militeristik tersebut, maka berdasarkan PP Nomor 1 tahun 1969 dan KEPPRES Nomor 44 tahun 1969 diubah menjadi Administrasi Pelabuhan/Badan Pengusahaan Pelabuhan yang dipimpin oleh Administrator Pelabuhan, untuk pelabuhan yang diusahakan dan Kepala Pelabuhan untuk pelabuhan yang tidak diusahakan. Otorita Pelabuhan merupakan lembaga penyelenggara pelabuhan yang profesional dan terdiri dari personil yang diusulkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pemerintah. Otorita Pelabuhan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Atas dasar hal tersebut diatas di dalam pembangunan kepelabuhanan (untuk pelabuhan baru) di daerah dengan peranan Pemerintah Daerah sangat penting mulai dari pemberian izin lokasi, pengadaan tanah, pemberian hak atas tanah dan perairan serta pengendalian lingkungan, perencanaan, penyusunan tata ruang dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP).

### **Fasilitas pelabuhan perikanan**

Agar fungsi dari pelabuhan perikanan maksimal diperlukan adanya fasilitas/sarana pelabuhan, adapun fasilitas/sarana dasar yang harus dimiliki oleh sebuah pelabuhan, yaitu:

#### *1. Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan*

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayanan, selain itu termasuk juga tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat kapal.

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan seperti tertera pada Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2. Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan

No.	Fasilitas/Sarana Pelabuhan Perikanan	Sarana Pelabuhan Perikanan
1.	Fasilitas pelindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemecah gelombang (<i>break water</i>);</li> <li>✓ Penangkap pasir (<i>grond grains</i>);</li> <li>✓ Turap penahan tanah (<i>revetment</i>);</li> <li>✓ <i>Jetty</i>.</li> </ul>
2.	Fasilitas tambat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dermaga;</li> <li>✓ Tiang tambat (<i>bolder</i>);</li> <li>✓ Pelampung tambat;</li> <li>✓ <i>Bollard</i>;</li> <li>✓ <i>Bier</i>.</li> </ul>
3.	Fasilitas perairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alur;</li> <li>✓ Kolam pelabuhan.</li> </ul>
4.	Fasilitas transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jembatan;</li> <li>✓ Jalan komplek;</li> <li>✓ Tempat parkir.</li> </ul>
5.	Lahan yang dicadangkan untuk kepentingan instansi pemerintah.	

(Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan, 1994)

## 2. Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan dan atau yang dapat diusahakan oleh perorangan atau badan hukum. Fasilitas fungsional terdiri dari fasilitas yang dapat diusahakan dan fasilitas yang tidak dapat diusahakan, masing-masing memiliki kriteria sendiri-sendiri.

Adapun hal-hal yang masuk dalam kategori fasilitas fungsional yang dapat diusahakan yaitu :

1. Fasilitas pemeliharaan kapal dan alat perikanan terdiri dari bengkel, *slipway/dock* dan tempat penjemuran jaring;
2. Lahan untuk kawasan industri;
3. Fasilitas pemasok air dan bahan bakar untuk kapal dan keperluan pengolahan Fasilitas pemasaran, penanganan hasil tangkapan, pengawetan dan pengolahan, tempat pelelangan ikan, tempat penjualan hasil perikanan, gudang penyimpanan asil olahan, pabrik es, sarana pembekuan, *cold storage*, peralatan *processing*, derek/*crane*, lapangan penumpukan.

Sedangkan fasilitas fungsional yang tidak dapat diusahakan meliputi :

1. Fasilitas navigasi : alat bantu navigasi, rambu-rambu dan suar
2. Fasilitas komunikasi : stasiun komunikasi serta peralatannya. (*Direktorat Jenderal Perikanan, 1994*).

Fasilitas tambahan atau penunjang pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas tambahan tersebut terdiri dari :

1. Fasilitas kesejahteraan nelayan terdiri dari : tempat penginapan, kios bahan perbekalan dan alat perikanan, tempat ibadah, serta balai pertemuan nelayan;

2. Fasilitas pengelolaan pelabuhan terdiri dari : kantor, pos penjagaan, perumahan karyawan, mess operator;
3. Fasilitas pengelolaan limbah bahan bakar dari kapal dan limbah industri. (*Direktorat Jenderal Perikanan, 1994*).

### **Usaha perikanan**

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan ikan, termasuk memproduksi ikan, baik melalui penangkapan (perikanan tangkap) maupun budidaya dan/ atau mengolahnya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan sebagai sumber protein dan nonpangan (pariwisata, ikan hias dll). Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk koperasi. Wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud adalah meliputi:

1. Perairan Indonesia;
2. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia;
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Setiap pelaku usaha perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Setiap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) memiliki isi yang berbeda tergantung untuk apa usaha itu dijalankan. Dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan, dicantumkan daerah pengumpulan/pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan. Serta dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

Ruang lingkup kegiatan usaha perikanan tidak hanya memproduksi ikan saja *on farm* tetapi juga meliputi kegiatan *off farm*, seperti kegiatan pengadaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, pemasaran, pemodalan, riset dan pengembangan, perundang-undangan, serta faktor usaha pendukung lainnya.

Berikut adalah jenis-jenis usaha perikanan, antara lain:

1. Usaha Perikanan Tangkap

Usaha perikanan tangkap adalah sebuah kegiatan usaha yang berfokus untuk memproduksi ikan dengan cara menangkap ikan yang berasal dari perairan darat (sungai, muara sungai, danau, waduk dan rawa) atau dari perairan laut (pantai dan laut lepas). Contoh : usaha penangkapan ikan tuna, ikan sarden, ikan bawal laut dan lain-lain.

2. Usaha Perikanan Budidaya atau Akuakultur

Usaha perikanan budidaya atau akuakultur adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memproduksi ikan dalam sebuah wadah pemeliharaan yang

terkontrol serta berorientasikan kepada keuntungan. Contoh : budidaya ikan lele, ikan gurami, ikan nila, ikan patin dan lain – lain.

### 3. Usaha Perikanan Pengolahan

Usaha perikanan pengolahan adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah produk perikanan, baik yang berasal dari bidang usaha perikanan tangkap maupun usaha perikanan budidaya atau akuakultur. Kegiatan usaha ini juga bertujuan untuk mendekatkan produk perikanan ini ke pasar dengan harapan dapat diterima oleh konsumen yang lebih luas. Contoh : pembuatan nugget ikan, bakso ikan dan kerupuk ikan.

Nelayan atau penggiat usaha dibidang perikanan tidak serta merta melakukan kegiatan perikanannya tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan kondisi tertib hukum maka mereka (pelaku kegiatan perikanan) mendapat pengawasan dari para pengawas yang selanjutnya disebut sebagai Pengawas Perikanan. Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan terdiri dari: PPNS Perikanan dan PNS Perikanan non penyidik. PERMEN Nomor 03 tahun 2007 menegaskan pengawas harus diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Syarat untuk dapat diangkat atau ditunjuk harus PNS Perikanan.

Tugas dan wewenang Pengawas perikanan menurut Undang-Undang adalah:

1. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
3. Memeriksa kegiatan usaha perikanan;
4. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
5. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
6. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
7. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
8. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
9. Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
10. Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **PENUTUP**

Sebagai kristalisasi dari pembahasan penyajian ini maka perlu dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pembentukan perlabuhan perikanan adalah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Pelabuhan Perikanan memiliki peranan sebagai tempat tambat labuh kapal Perikanan. Mempunyai fungsi pengusahaan dan pemerintahan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan di Indonesia sedikit banyak telah menjalankan fungsinya sebagai pendukung kegiatan usaha dibidang perikanan dengan baik meskipun ada beberapa kendala sehingga terjadi sedikit ketidak teraturan dalam pelaksanaannya.

2. Pelabuhan Perikanan sebagai pendukung kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran dalam mengemban peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah berupaya melaksanakan pelayanan maksimal berupa pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan serta pelayanan pengusahaan berupa penyediaan dan pelayanana berbagai jasa kepelabuhan. Adapun hambatan-hambatan yang sering muncul dalam prakteknya seperti:
  - a. Kapal perikanan masih sering mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi terutama pada puncak musim ikan;
  - b. Sebagian kapal perikanan belum memenuhi standar sanitasi, demikian juga dengan tempat pendaratan ikan;
  - c. Pemilik kapal kurang menyadari ketaatan ketentuan dalam pemasaran ikan hasil tangkapan terutama yang akan diekspor, dimana ikan tersebut harus dilengkapi dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).
3. Pemerintah, selama ini dalam mengembangkan perikanan telah menempuh dua macam cara pendekatan. Pertama, dengan mengembangkan terlebih dahulu prasarana pelabuhan perikanan dengan tujuan untuk merangsang perkembangan usaha perikanan di daerah yang bersnagkutan untuk kemudian lebih memajukannya. Pendekatan ini berorientasi kepada prospek perkembangan usaha penangkapan dan pemasaran di masa mendatang, dengan konsekuensi bahwa pada tahap permulaannya pelabuhan yang telah dibangun tersebut belum menunjukkan fungsinya. Akan tetapi dengan harapan secara bertahap dapat maju sehingga nantinya dapat mencapai kapasitas penggunaan yang optimal. Pendekatan yang kedua, adalah pelabuhan perikanan di daerah-daerah yang sebelumnya telah menunjukan usaha perikanan yang telah berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Dahuri, Rokhmin. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Fauzi, A dan Anna,S. 2005. *Permodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan*. Gramedia: Jakarta.

Kaloh, J. 2007 . *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta : Rineka Cipta.

Solihin, Ahmad. 2010. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia: Bandung.

#### **PERTANYAAN**

- Apakah ada kasus-kasus penyelewengan atau pelanggaran dan bagaimana menanggapi?
- Pada keadaan real lapangan, apakah sudah sesuai? Jika belum, pada bagian apa saja yang sesuai?

#### **JAWABAN**

- Ada. Upaya yang dilakukan adalah dengan arahan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui sosialisasi
- Secara keseluruhan sudah sesuai dengan peraturan



## ANALISA KELAYAKAN FINANSIAL INDUSTRI SURIMI TERKEMAS

*Fathiah Ulfah, Muh.Tamrin, Renny Primasari G.P., Harianto*

Gedung II Lt.17 BPPT Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat 10430.  
Alamat korespondensi: *dea\_ulfah@yahoo.com*

### ABSTRAK

Permasalahan yang dialami industri surimi adalah bahan baku yang kurang kontinyu karena bersifat musiman serta jumlah tangkapan laut yang semakin menurun. Hal ini mengakibatkan beberapa industri tidak dapat berproduksi pada kapasitas penuh. Solusi terhadap masalah ini adalah digunakannya alternatif bahan baku dari ikan budidaya air tawar. Ikan lele merupakan pilihan yang paling tepat karena produksi yang relatif mudah dan perkembangan produksinya terus meningkat (rata-rata laju 35,8%/tahun). Dari sisi kualitas, hasil uji menunjukkan kualitas surimi yang dibuat dari ikan lele memenuhi standar kualitas surimi. Akan tetapi permasalahan mendasar adalah harga bahan baku dari ikan lele Rp 12.500/kg lebih mahal dibanding bahan baku surimi dari ikan tangkapan laut Rp 6.500. Oleh karena itu surimi berbahan baku ikan lele tidak layak bila dijual dengan harga sama dengan produk surimi dari ikan tangkapan laut yaitu sekitar Rp 720.000 per karton berisi 2 x 10 kg. Hal inilah yang melatarbelakangi timbulnya gagasan konsep produk “surimi terkemas” yaitu surimi dengan kemasan ukuran kecil untuk target konsumen langsung rumah tangga, harga yang ditetapkan adalah harga pada level *retail* eceran yang umumnya lebih tinggi dari Rp 19.500 per kemasan. Usaha produksi surimi terkemas ini diperuntukan untuk usaha kecil menengah (UKM) dengan investasi Rp 5.108.750.000. Kapasitas produksi yang dirancang adalah sebesar 5.000 kg bahan baku per hari dengan rendemen hasil sebesar 25%. Berdasarkan perhitungan analisis didapatkan bahwa *NPV* Rp 763.955.336, *IRR* 26%, dan *PBP* 2,1 tahun. Dengan demikian usaha tersebut layak secara finansial.

**Kata Kunci :** ikan air tawar, surimi, kelayakan ekonomi

### PENDAHULUAN

Surimi merupakan daging ikan yang telah mengalami berbagai proses diperlukan untuk memperpanjang umur simpan dan bisa digunakan sebagai bahan baku produk olahan ikan. Proses pembuatannya melalui protein miofibril ikan yang telah distabilkan dan diproduksi melalui tahapan proses secara kontinyu yang meliputi penghilangan kepala dan tulang, pelumatan daging, pencucian, penghilangan air, penambahan *cryoprotectant*, dilanjutkan dengan atau tanpa perlakuan, sehingga mempunyai kemampuan fungsional terutama dalam membentuk gel dan mengikat air.

Untuk memperluas pemanfaatan surimi pada masyarakat perlu dibuat desain kemasan skala rumah tangga yang akan dilengkapi dengan formula aplikasi surimi pada berbagai produk olahan. Produk surimi yang dibuat adalah dengan bentuk balok, bentuk ini dipilih karena mudah dibentuk dan mudah dalam penyusunan dalam tempat penyimpanan, pemasaran dan dikemas dalam kemasan plastik polietylen vakum.

Usaha surimi terkemas ini diperuntukan untuk usaha kecil menengah (UKM), hal ini dikarenakan investasi yang dibutuhkan bukanlah nilai investasi yang sangat besar, kemudian tenaga kerja yang digunakan pun jumlahnya tidak terlalu banyak serta peralatan yang digunakan dalam usaha ini adalah jenis peralatan yang sederhana dan beberapa peralatan yang digunakan pun tidak semua

sudah termekanisasi, sehingga ada beberapa tahapan yang masih dikerjakan oleh tenaga manusia.

### **Ruang lingkup**

Permasalahan yang dialami industri surimi adalah bahan baku yang kurang kontinyu karena bersifat musiman serta jumlah tangkapan laut yang semakin menurun. Hal ini mengakibatkan beberapa industri tidak dapat berproduksi pada kapasitas penuh (*idle capacity*). Solusi terhadap masalah ini adalah digunakannya alternatif bahan baku dari ikan budidaya air tawar. Ikan lele merupakan pilihan yang paling tepat karena produksi yang relatif mudah dan perkembangan produksinya terus meningkat (rata-rata laju 35,8%/tahun). Dari sisi kualitas, hasil uji menunjukkan kualitas surimi yang dibuat dari ikan lele memenuhi standar kualitas surimi

Analisis kelayakan finansial industri surimi dibuat berdasarkan pada harga-harga yang berlaku dipasaran. Hal yang dianalisis adalah biaya dan manfaat dari kegiatan pengolahan surimi terkemas ini mulai dari investasi pengolahan, pembelian bahan baku hingga penjualan produk. Dengan adanya analisis finansial ini dapat memberikan gambaran mengenai penilaian kinerja terhadap perusahaan serta prospek di masa yang akan datang. Selain itu dengan adanya analisa ini maka akan memberikan gambaran mengenai besarnya investasi dan biaya yang harus ditanggung dalam membangun usaha dan besarnya manfaat yang akan diterima.

### **MATERI DAN METODE**

Metode yang digunakan untuk analisis kelayakan ini adalah *Payback Periode* (PBP), *Internal Rate of Return* (IRR), *Net Present Value* (NPV), dan Net B/C.

#### **1. Pay Back Periode**

Adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk megembalikan investasi yang telah dikeluarkan dengan total nilai sekarang arus kas yang akan dihasilkan. Semakin cepat investasi dapat dikembalikan, semakin baik usaha tersebut untuk dipilih. Untuk mendapatkan periode pengembalian pada suatu tingkat pengembalian tertentu digunakan rumus sebagai berikut :

$$PBP = n + \frac{a - b}{c - b} \times 1 \text{ tahun}$$

#### **2. IRR**

Adalah discount rate yang menyamakan nilai sekarang (present value) dari kas masuk dan nilai investasi suatu usaha, dengan kata lain IRR adalah discount rate yang menghasilkan NPV =0. Jika biaya modal suatu usaha lebih besar dari IRR, maka NPV menjadi negative, sehingga usaha tersebut tidak layak untuk diambil. Rumus yang digunakan untuk menghitung IRR adalah :

$$IRR = r_1 + (r_2 - r_1) \times \frac{NPV}{NPV_1 - NPV_2}$$

Keterangan :

- $r_1$  : Tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif
- $r_2$  : Tingkat diskonto yang menghasilkan NPV negative
- $NPV_1$  : Net Present Value bernilai positif
- $NPV_2$  : Net Present Value bernilai negative

*Social Oppurtunity Cost If Capital* (SOCC) adalah Biaya sosial yang ditanggung masyarakat, biasanya digunakan sebagai diskon faktor. SOCC ini sangat berhubungan dengan IRR

- $IRR < SOCC$ , berarti usaha atau proyek tersebut tidak layak secara finansial
- $IRR = SOCC$ , berarti usaha atau proyek tersebut berada dalam keadaan break even point
- $IRR > SOCC$ , berarti usaha atau proyek tersebut layak secara finansial.

### 3. Net Present Value

Adalah perbedaan antara nilai sekarang dari benefit dengan nilai sekarang biaya yang besarnya dapat digitung dengan rumus sebagai berikut :

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{B_t - C_t}{(1-i)^t} K_0$$

Keterangan :

- $B_t$  : Benefit bruto proyek pada tahun ke -t
- $C_t$  : Biaya bruto pada tahun ke - t
- $n$  : Umur ekonomis proyek
- $i$  : Tingkat bunga modal (%)
- $t$  : Proyek pertahun
- $K_0$  : Investasi awal ( initial investment)

Apabila dalam perhitungan NPV diperoleh lebih besar dari nol atau positif, maka proyek yang bersangkutan diharapkan menghasilkan tingkat keuntungan, sehingga layak untuk diteruskan. Jika nilai hasil bersih lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan atau akan merugi.

### 4. Net B/C.

Merupakan nilai manfaat yang bisa didapatkan dari proyek atau usaha setiap kita mengeluarkan biaya sebesar satu rupiah untuk proyek atau usaha tersebut. Net B/C merupakan perbandingan antara NPV positif dengan NPV negatif. Nilai Net B/C memiliki arti sebagai berikut:

- $Net\ B/C > 1$ , maka berarti proyek atau usaha layak dijalankan secara finansial.
- $Net\ B/C = 1$ , hal ini juga berarti bahwa usaha atau proyek tersebut berada dalam keadaan *break even point*.
- $Net\ B/C < 1$ , maka berarti proyek atau usaha tidak layak dijalankan secara finansial.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Net B/C adalah:

$$Net\ B/C = \frac{\sum_{t=1}^n NB_t(+)}{\sum_{t=1}^n N\bar{B}_t(-)}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama ini bahan baku yang digunakan dalam industri surimi berasal dari hasil tangkapan ikan air laut, sehingga ketersediaannya sangat tergantung pada berbagai kondisi, seperti musim yang sedang berlangsung, jumlah populasi ikan serta jumlah tangkapan kapal para nelayan, sehingga mempengaruhi pasokan bahan baku industri surimi tersebut.

Permasalahan yang dialami industri surimi adalah bahan baku yang kurang kontinyu karena bersifat musiman serta jumlah tangkapan laut yang semakin menurun. Hal ini mengakibatkan beberapa industri tidak dapat memproduksi pada kapasitas penuh (*idle capacity*). Solusi terhadap masalah ini adalah digunakannya alternatif bahan baku dari ikan budidaya air tawar.

Ikan lele merupakan pilihan yang paling tepat karena produksi yang relatif mudah dan perkembangan produksinya terus meningkat (rata-rata laju 35,8%/tahun). Dari sisi kualitas, hasil uji menunjukkan kualitas surimi yang dibuat dari ikan lele memenuhi standar kualitas surimi.

Target pasar yang dibidik untuk produk surimi terkemas ini adalah untuk kalangan ibu rumah tangga yang ingin menyajikan olahan ikan sehat yang diolah sendiri. Sehingga kandungannya lebih terjamin dan tanpa tambahan bahan pengawet. Marketing mix- bauran pemasaran 4P (*product, price, place, promotion*)

- *Product* yang dimaksud disini adalah mengacu pada value yang terdapat pada produk tersebut, bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan konsumen, serta penanganan kualitasnya. Produk surimi merupakan bahan baku untuk pengolahan makanan berbasis ikan, dan diproses secara higienis dengan suhu yang terkontrol sehingga kualitas produk dapat terjaga. Produk surimi ini dikemas dalam bentuk kecil yaitu 300 gr.

Pemilihan surimi terkemas dengan berat 300 gr dengan asumsi bahwa keluarga terdiri dari 4 anggota keluarga dengan porsi lauk per orang adalah 75 gram sekali makan. Maka kemasan ideal untuk 1 keluarga dan sekali masak adalah 300 gram. Dengan demikian maka diharapkan satu kemasan akan habis dalam sekali konsumsi. Rancangan produk dibuat menjadi 2 x 150 gr, ditujukan agar konsumen tidak perlu memotong bila ingin mengolah setengah porsi kemasan. Resep olahan yang dicantumkan dalam kemasan surimi ini juga sudah ditakar sesuai dengan ukuran untuk pengolahan sebesar 300 gr.

Kelebihan lain yang ditawarkan untuk menarik konsumen ini adalah dilengkapi dengan teks formula aplikasi surimi atau resep masakan untuk berbagai produk olahan atau masakan seperti bakso, nugget, kaki naga, otak-otak, sosis ikan, dimsum, siomay ikan, ekado dan lain-lain..

- *Price* disini mengacu pada harga produk yang akan dijual kepada konsumen, sehingga konsumen mau mengeluarkan uang miliknya untuk membeli produk tersebut. Hal ini mencakup strategi penentuan harga produk agar bisa bersaing dengan produk kompetitor. Harga yang dicantumkan untuk surimi kemasan 300 gr ini adalah berkisar di angka Rp. 19.500,-.

Di pasaran produk surimi yang beredar adalah kemasan besar yaitu 10 kg/ blok dengan jumlah 2 blok untuk 1 karton, dengan harga per mc Rp 720.000,- dan biasanya konsumennya adalah untuk pasar ekspor, sehingga pasar dalam negeri belum banya mengenal tentang surimi ini, untuk pasar dalam negeri pasarnya

relatif lebih sedikit dan walaupun ada surimi yang dijual pun memiliki grade yang kelas keduanya.

Dengan adanya kemasan ekonomis kecil ini diharapkan dapat memudahkan konsumen rumah tangga yang ingin berkreasi mengolah makanan berbasis ikan dengan resep sendiri dan dengan harga yang terjangkau.

- *Place* atau tempat disini mengacu pada tempat atau produk tersebut dipasarkan, dan kemungkinan produk tersebut bisa dijangkau oleh konsumen. Tempat produk surimi ini akan dipasarkan adalah pada supermarket, minimarket atau agen-agen penjualan yang ada di kota dan memiliki mesin pendingin sebagai wadah penyimpanannya sehingga produk ini bisa sampai ke konsumen rumah tangga dengan mudah. Dan tidak merusak mutu dari produk itu sendiri, karena produk ini membutuhkan penanganan dan penyimpanan dalam suhu dingin.
- *Promotion*, berkaitan dengan bagaimana cara mempromosikan produk agar diterima konsumen dan melakukan pembelian. Promosi ini mencakup iklan dan publisitasnya. Promosi yang dilakukan bisa melalui berbagai media promosi seperti pemasangan banner di supermarket, penyebaran brosur, pemasangan iklan, pameran, dan media online. Selain itu juga promosi bisa dilakukan dengan mendatangi calon konsumen ke rumah dengan mengadakan demo masak dengan menggunakan produk surimi ini.

### **Asumsi kelayakan finansial**

Dalam pembahasan analisa financial ini menggunakan beberapa asumsi yang digunakan dalam usaha yang sebenarnya, sehingga dalam pembahasan dapat mendekati kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Beberapa asumsi yang digunakan adalah :

#### *1. Biaya Investasi*

Sumber daya yang digunakan oleh industri ini berasal dari modal sendiri sebesar 30% dan modal pinjaman dari Bank sebesar 70 % dari total investasi yang dibutuhkan. Berarti modal milik sendiri yang dikeluarkan oleh pemilik modal adalah sebesar Rp. 1.532.625.000,- sedangkan modal yang berasal dari pinjaman bank adalah sebesar Rp. 3.576.125.000,-.

Biaya investasi yang digunakan dalam usaha surimi ini adalah sebesar Rp.5.108.750.000,- , yang terdiri dari modal tetap dan modal kerja. Dimana modal tetap yang digunakan adalah terdiri dari Peralatan kantor dan bangunan sebesar Rp. 3.100.000.000,- , Mesin dan Alat produksi sebesar Rp. 2.000.000.000,- , Serta tanah seluas 1000m<sup>2</sup> . Sedangkan modal kerja yang digunakan selama 2 bulan sebesar Rp. 2.008.750.000,- ..

#### *2. Kapasitas produksi dan harga input*

Kapasitas produksi surimi sebesar 5.000 kg bahan baku ikan lele, dengan asumsi rendemen yang diperoleh dari daging ikan lele ini adalah sekitar 25% dari berat ikan, harga bahan baku yang berkisar diharga Rp. 12.500,-

#### *3. Harga jual produk*

Harga jual produk surimi grade satu kemasan 300 gr berkisar antara Rp.19.500,- per kemasannya.

## **Kelayakan finansial industri surimi terkemas**

Penilaian kelayakan investasi industry surimi tekemas yang digunakan untuk memprediksi kelayakan investasi usaha surimi terkemas ini adalah dengan menggunakan parameter *Payback Periode* (PBP), *Internal Rate of Return* (IRR), *Net Present Value* (NPV), B/C Ratio. Berdasarkan hasil perhitungan data pengurangan biaya dan manfaat yang timbul akibat usaha surimi terkemas ini adalah sebagai berikut :

1. Industri surimi terkemas ini membutuhkan waktu selama 2 tahun 1 bulan untuk mengembalikan investasi yang telah ditanamkan pada usaha pengolahan surimi ini.
2. Berdasarkan hasil perhitungan kelayakan finansial yang dilakukan didapat nilai IRR sebesar 26%.
3. Dari hasil perhitungan NPV untuk usaha surimi terkemas ini adalah sebesar Rp.763.955.336,-. Nilai tersebut lebih besar dari nol yang mengindikasikan bahwa usaha surimi adalah layak dilaksanakan.
4. Net Benefit Cost (B/C) ratio merupakan rasio pendapatan dibandingkan dengan biaya yang telah dihitung nilai sekarang. Nilai net B/C adalah sebesar 1, hal ini menunjukkan nilai B/C dinilai layak untuk dijalankan secara finansial.

## **Analisa finansial**

Penilaian kelayakan investasi usaha surimi terkemas yang selanjutnya akan dipergunakan untuk memprediksi kelayakan investasi usaha surimi terkemas adalah menggunakan parameter *Payback Periode*, *Internal Rate of Return*, *Net Present Value*, *Net B/C*. Perhitungan kelayakan investasi kelayakan diperoleh melalui data hasil pengurangan biaya dan manfaat yang timbul karena adanya usaha surimi. NPV merupakan selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang. Selain itu NPV menunjukkan besarnya pendapatan yang akan diperoleh investor apabila menanamkan modalnya pada usaha surimi.

Nilai IRR yang diperoleh jika dibandingkan dengan nilai investasi di Bank. Presentase nilai IRR menunjukkan besarnya nilai perolehan keuntungan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan investasi di Bank yaitu sebesar 26 %. Nilai IRR ini menunjukan bahwa usaha surimi terkemas ini layak untuk dijalankan. *Payback periode* yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan yaitu selama 3 tahun 8 bulan. Dan *Net B/C* menunjukan bahwa usaha surimi terkemas ini memiliki nilai 1, yang berarti usaha surimi terkemas ini layak untuk dijalankan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Usaha produksi “surimi terkemas” dari bahan baku ikan lele dengan kemasan ukuran 2 x 150 gram dengan harga jual Rp 19.500 per kemasan dengan investasi Rp 5.108.750.000,- adalah layak secara finansial dengan *NPV* Rp 763.955.336, *IRR* 26%, dan *PBP* 2,1 tahun
2. Pengelolaan bahan baku yang akan digunakan harus tetap dijaga ketersediaannya walaupun persaingan dengan bisnis warung makan tidak sedikit, akan tetapi dengan kemudahan budidaya terhadap ikan jenis ini maka

akan mempermudah dalam penyiapan bahan baku ikan ini. Analisa kelayakan financial surimi terkemas dengan skala UKM ini memberikan gambaran bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa parameter yang menunjukkan nilai positif baik dari *Payback periode (PBP)*, *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)* maupun nilai Net B/C.

3. Berdasarkan data hasil perhitungan kelayakan financial usaha surimi terkemas ini selanjutnya data dijadikan acuan bagi analisis kelayakan usaha surimi di beberapa daerah yang memiliki potensi bahan baku yang cukup dengan mengacu pada kelayakan usaha surimi yang ada, dan dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang sesuai dengan karakteristik daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Abdullah, Analisis Dampak Krisis, FE UI, 2009
- Alma, Buchari, 2004, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Edisi Revisi, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Assauri, S. 2004. Manajemen Produksi dan Operasi. FEUI. Jakarta.
- Basu Swastha dan Irawan, 2005, Manajemen Pemasaran Modern. Liberty,. Yogyakarta.
- Djazuli N, Wahyuni M, Monintja D, Purbayanto A, Analisis Finansial Pengolahan Surimi Dengan Skala Modern dan Semi Modern, Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, 2009
- Kotler, Philip. 2000. Manajemen Pemasaran. Jilid 2. Jakarta. Bumi Aksara
- Royanti, Ida, Potensi Bahan Baku Surimi Karakteristik Dan Produk Olahan Surimi, Laporan Teknikal Report, BPPT 2011
- Tjiptono, Fandy, 2005, Pemasaran Jasa, Bayumedia : Malang.
- <http://www.djpb.kkp.go.id/berita.php?id=515> di download pada tanggal 27 Agustus 2013
- <http://chittaniadevitasari.wordpress.com/2011/11/03/apakah-itu-npv-pv-irr-dan-socc/>

## ANALISIS FINANSIAL DAN PEMASARAN PRODUK SIOMAY IKAN (STUDI KASUS CV. BENING JATI ANUGRAH, PARUNG, JAWA BARAT)

*Aef Permadi<sup>1</sup>, Siti Zachro Nurbani<sup>1</sup>, dan Nanda Lailatul Firman<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Program Studi Pengolahan Hasil Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan  
Jl. AUP 01, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 7239, Telp/Fax: (021) 7805031/(021) 78830275  
Alamat Korespondensi: [nandaeladitya@yahoo.com](mailto:nandaeladitya@yahoo.com)

### ABSTRAK

Salah satu produk diversifikasi produk perikanan yang saat ini memiliki prospek pasar yang bagus adalah siomay. Salah satu UMKM yang mengolah produk Siomay ikan adalah CV. Bening Jati Anugrah, Parung, Jawa Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek finansial usaha pengolahan siomay ikan dan juga preferensi konsumen terhadap produk siomay ikan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak yang berkompeten di bidangnya, termasuk dengan konsumen. Sampling responden konsumen dilakukan dengan metode purposive sampling. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif. Hasil pengamatan aspek finansial terhadap produk siomay ikan di CV. Bening Jati Anugrah diperoleh hasil yaitu, biaya investasi dengan jumlah total Rp. 379.818.865, biaya produksi total yaitu Rp. 168.739.045, laba Rp. 105.824.089,-/ tahun, *Break Event Point* (BEP) Rp. 90.445.800 dan BEP *quantity* yaitu 5653 pack/tahun, *Benefit Cost Ratio* 1,7, *Payback Periode* yaitu 2 tahun, 10 bulan, 39 hari, *Internal Rate of Return* sebesar 20,29%, dan *Net Present Value* sebesar Rp. 20.300.865,-.. Pemasaran CV. Bening Jati Anugrah yaitu pemasaran langsung, pemasaran melalui pengecer, pemasaran melalui agen dan pemasaran melalui *modern retailer*. Karakteristik konsumen berdasarkan jenis kelamin diperoleh yaitu 37 orang atau 62% untuk responden perempuan, sedangkan responden laki-laki yaitu 23 orang atau 38%. Konsumen terbanyak membeli adalah konsumen dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 17 orang atau 34%, kemudian dengan pekerjaan sebagai wiraswasta/pengusaha sebanyak 11 orang atau 22%, pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 10 orang atau 20%, pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 6 orang atau 12%, dan yang terakhir masih berstatus sebagai pelajar sebanyak 6 orang atau 12%. Alasan konsumen membeli produk Siomay ikan adalah karena rasanya dan juga teksturnya.

**Kata Kunci : finansial, pemasaran, karakteristik, siomay ikan**

### PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah pengolahan, terutama peranannya dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing produk. Keberadaan unit pengolahan ikan tersebut menyerap banyak tenaga kerja yang dilibatkan di bidang industri pengolahan dan pemasaran. Untuk itu, pengembangan industri pengolahan makin dibutuhkan di masa depan dan diharapkan akan terjadi perubahan signifikan dari kondisi sekarang ini.

Pemerintah melalui beberapa kebijakan dan regulasi yang berpihak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus mengembangkan wirausahawan di bidang kelautan dan perikanan khususnya pemasaran dan pengolahan hasil perikanan. Pengembangan wirausaha tersebut diharapkan dapat



mendorong upaya penambahan jumlah wirausaha di Indonesia yang saat ini baru mencapai 0,18% dari jumlah penduduk.

Jumlah unit pengolahan ikan yang ada di Indonesia mencapai 60.117, termasuk diantaranya unit pengolahan yang menghasilkan *fish jelly product* seperti siomay, bakso ikan, nugget, kaki naga dan lainnya. Unit usaha ini, beberapa tahun ini telah berkembang cukup besar terutama di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya baik dalam skala kecil menengah (UMKM) maupun skala besar. Hal ini diantaranya dapat disebabkan karena berkembangnya ekonomi nasional, dan juga perubahan pola konsumsi masyarakat yang menyukai makanan yang bergizi dan makanan siap saji karena kehidupan setiap individu yang semakin padat

CV. Bening Jati Anugrah merupakan salah satu UMKM yang memproduksi produk olahan ikan berbasis daging ikan. Salah satu produk unggulan yang dihasilkannya yaitu Siomay ikan yang mampu bersaing di pasar. Siomay adalah salah satu jenis dimsum di Indonesia terdapat berbagai jenis variasi siomay berdasarkan daging untuk isi, mulai dari siomay ikan tenggiri, ayam, udang, cumi, kepiting, atau campuran lainnya yang dicampur dengan sagu atau tapioka. Kulitnya yang lembut ditambah racikan bumbu rempah-rempah yang berkualitas menambah lezatnya rasa ketika disantap baik oleh kalangan anak-anak hingga lansia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi usaha produk siomay ikan melalui analisis aspek finansial dan juga preferensi konsumen terhadap produk siomay ikan yang dihasilkan CV. Bening Jati Anugrah.

## **MATERI METODE**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk aspek keuangan dengan cara mewawancarai pemilik usaha dan sumber-sumber lainnya yang mendukung dalam pengumpulan data. Analisis karakteristik konsumen terhadap siomay ikan kakap dilakukan dengan cara survei langsung di lapangan terhadap konsumen dengan menyebarkan kuisisioner sebanyak 50 kuisisioner terhadap responden yang membeli produk langsung ke CV. Bening Jati Anugrah dan membeli pada pengecer di kota Parung, Bogor, dan Depok yang merupakan tujuan pemasaran

Analisis data finansial dilakukan dengan Rugi/laba, BEP, B/C Ratio, PP, NPV, IRR, sedangkan data konsumen dengan analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Analisis Aspek Keuangan (Finansial)**

Analisis finansial merupakan salah satu cara mengukur tingkat kelayakan usaha yang berlaku secara menyeluruh dan pada umumnya. Suatu kegiatan usaha yang baik hendaknya dimulai dengan perencanaan yang baik dan matang melalui studi kelayakan usaha yang akurat. Secara umum tujuan analisis finansial terdiri atas berbagai tujuan yang ingin atau dicapai oleh suatu usaha, selain itu analisis dilakukan untuk mengetahui investasi, biaya variabel, biaya tetap, serta laba rugi dari suatu usaha.

### 3.1.1 Investasi

Investasi adalah modal yang ditanamkan pertama kali dalam suatu usaha. Investasi yang ada di CV. Bening Jati Anugrah meliputi: tanah bangunan; bangunan; mesin penggiling; mesin pencampur; *cold storage*; *sealer*; freezer; meja *stainless*; timbangan; pisau besar; talenan; kipas angin kecil; kipas angin besar; baskom plastik; kompor; panci kukus; ember besar; para-para dll.dengan jumlah totalnya adalah Rp.379.818.865,-

### 3.1.2 Biaya produksi

Biaya produksi dibedakan menjadi dua yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat produksi,yang termasuk biaya variabel dalam pengolahan siomay ikan di CV. Bening Jati Anugrah antara lain: pembelian bahan baku utama dan bahan pembantu, bumbu-bumbu, tepung, kemasan, listrik, BBM dll. Biaya variabel per bulan adalah Rp.9.424.142,- sedangkan untuk per tahun adalah Rp.113.089.704,- . Menurut Umar (2005), titik berat dari biaya variabel ini adalah jumlah dari biaya variabel tersebut, bukan besarnya biaya variabel per unit.

Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap, tidak tergantung kepada perubahan tingkat kegiatan dalam menghasilkan produk didalam interval tertentu. Biaya tetap di CV. Bening Jati Anugrah adalah gaji pemilik usaha, upah karyawan, penyusutan investasi. Sedangkan menurut Umar (2005), yang termasuk biaya tetap antara lain: biaya penyusutan, tenaga kerja langsung, gaji direksi, dan listrik. Sedangkan total biaya tetap per bulan adalah Rp.4.637.445,- dan total per tahunnya yaitu Rp. 55.649.341,-.

### 3.1.3 Analisis titik impas / Break Event Point (BEP)

Analisis titik impas atau yang lebih dikenal dengan BEP merupakan suatu nilai dimana hasil penjualan produksi sama dengan biaya produksi sehingga pengeluaran sama dengan pendapatan. Perhitungan BEP digunakan untuk menentukan batas minimum volume penjualan agar suatu perusahaan tidak rugi. Selain itu, BEP dapat dipakai untuk merencanakan tingkat keuntungan yang dikehendaki dan sebagai pedoman dalam mengendalikan operasi yang sedang berjalan (Rahardi, 2001).

Besarnya nilai BEP (kapasitas produksi) untuk pengolahan siomay ikan di CV. Bening Jati Anugrah adalah 5653 pack per tahun dengan harga penjualan sebesar Rp.90.445.800. Dari hasil perhitungan BEP tersebut, pengolahan sosis ikan cukup baik dan layak untuk dikembangkan.

### 3.1.4 Analisis Laba / Rugi

Analisis laba/rugi diketahui dari selisih pendapatan dengan total biaya. dengan pendapatan per tahun adalah Rp 293.952.000,- dan total biaya produksi Rp 176.369.679,-sehingga laba sebelum pajak sebesar 10% yaitu Rp. 117.582.321,- dan laba bersih yaitu Rp.105.824.089,- per tahun.

### 3.1.5 Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)

Perhitungan B/C Ratio ini untuk menentukaakan kelayakan suatu usaha. Bila nilainya 1 berarti usaha tersebut belum mendapatkan keuntungan sehingga perlu dilakukan pembenahan. Semakin kecil hasil perhitungan B/C Ratio ini maka perusahaan akan semakin menderita kerugian (Rahardi, 2001). Hasil perhitungan

B/C Ratio adalah 1,7 artinya, pendapatan yang diterima besarnya 1,7 kali dari total biaya produksi atau sebesar 170%.\

### 3.1.6 Payback Period

Analisis *Payback Period* (PP) atau waktu balik modal dalam studi kelayakan siomay ikan di CV. Bening Jati Anugrah waktu yang ditempuh selama 2,94 (2 tahun, 10 bulan, 3 hari) artinya modal investasi yang dikeluarkan untuk membangun usaha siomay ikan di CV. Bening Jati Anugrah akan kembali setelah usaha tersebut dijalankan dalam waktu 8 tahun, 4 bulan, 39 hari.

Menurut Ibrahim (2003), bahwa semakin cepat dalam pengembalian biaya investasi sebuah proyek, semakin baik proyek tersebut karena semakin lancar perputaran modal.

### 3.1.7 Internal Rate of Return (IRR)

*Internal Rate of Return* (IRR) digunakan untuk mencari tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dimasa yang akan datang. Hasil perhitungan IRR Usaha pengolahan Siomay ikan kakap merah diperoleh sebesar 20,29%. Nilai IRR tersebut masih masih diatas tingkat suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 18%, berarti usaha pengolahan siomay ikan kakap merah layak untuk dijalankan.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2006), *Internal Rate of return* (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil *intern*. Apabila nilai IRR (<) dari bunga pinjaman, maka ditolak.

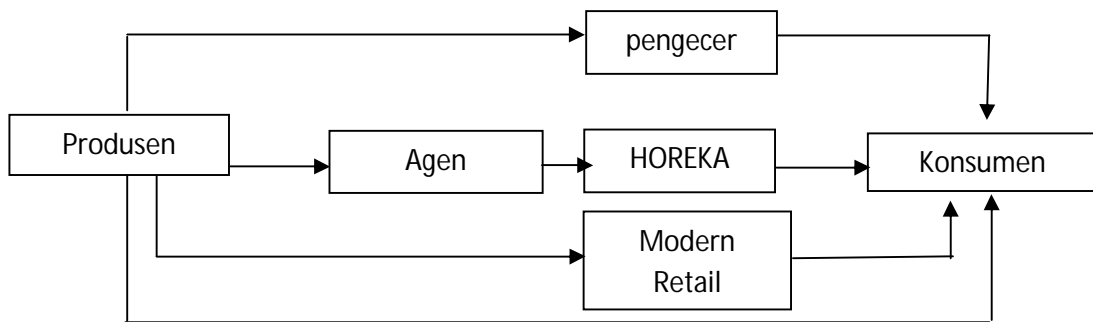
### 3.1.8 Net Present Value (NPV)

*Net Present Value* (NPV) usaha pengolahan siomay ikan kakap merah dari hasil perhitungan nilai sekarang berdasarkan tingkat suku bunga pinjaman UKM (18%) diperoleh sebesar Rp.20.300.865,-. NPV ini menunjukkan nilai bersih yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Nilai NPV yang lebih besar dari nol (positif) berarti usaha tersebut layak untuk dijalankan. Hasil penilaian investasi usaha pengolahan siomay ikan kakap merah terhadap *net present value* (NPV) dapat dilihat pada lampiran 7.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2006), *net present value* (NPV) merupakan perbandingan antara PV kas bersih (*PV of proceed*) dengan PV investasi (*capital outlays*) selama umur investasi. Menurut Ibrahim (2003), apabila *net present value* (NPV) (>0), maka usaha atau proyek tersebut layak untuk dilaksanakan dan apabila *net present value* (NPV) (>0), maka usaha atau proyek tidak layak untuk dilaksanakan.

## 3.2 Analisis saluran pemasaran

CV. Bening Jati Anugrah memasarkan produknya dengan beberapa cara, yaitu secara langsung kepada konsumen, memasarkan melalui agen, pengecer, dan memasarkannya melalui *modern retailer*. Diagram saluran distribusi pemasaran siomay ikan CV. Bening Anugrah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram distribusi produk siomay ikan CV. Bening Jati Anugrah

Berdasarkan Gambar 1, terdapat 4 cara pemasaran produk siomay ikan di CV. Bening Jati Anugrah, yaitu, pemasaran langsung, pemasaran melalui pengecer, pemasaran melalui agen, dan pemasaran melalui *modern retailer*.

Pemasaran langsung yaitu dimana konsumen membeli langsung produk siomay ikan ke CV. Bening Jati Anugrah, meskipun tidak memiliki outlet khusus untuk menjual produknya tetapi CV. Bening Jati Anugrah tetap melayani konsumen yang membeli produk langsung di perusahaan, penjualan dengan cara ini produk siomay dihargai dengan harga Rp. 16000,-/ pack isi 500 gram, dimana harga ini cukup murah bagi konsumen jika dibandingkan dengan membeli pada pengecer.

Pemasaran melalui pengecer adalah dimana pengecer membeli produk langsung kepada CV. Bening Jati Anugrah seharga Rp. 15.500,-/pack yang kemudian dijual kembali kepada konsumen dengan harga Rp. 18.000,-/pack, sehingga diperoleh margin Rp. 2500,-/pack

Pemasaran dengan cara melalui agen merupakan cara pemasaran yang paling besar nilai penjualannya, hal ini dikarenakan agen memiliki koneksi khusus dengan Hotel, Restoran, dan Katering (HOREKA) di beberapa daerah di sekitar JABODETABEK dan Bandung, tetapi dengan label yang mereka desain sendiri dan menggunakan merk dagang “FERONIS”, agen ini hampir setiap hari memasok siomay dan produk olahan lain dari CV. Bening Jati Anugrah ke HOREKA, penjualan dengan cara ini produk siomay dihargai Rp. 15500,-/pack, kemudian agen menjual produk ke HOREKA dengan harga Rp. 20.000,-/pack, sehingga di dapat margin yaitu Rp. 4500,-/pack, sedangkan margin harga dari HOREKA ke konsumen tidak diketahui, hal ini dikarenakan agen merahasiakan lokasi dan nama HOREKA yang mereka pasok, dengan alasan ketatnya persaingan untuk memasuki pasar tersebut.

Pemasaran *modern retail* merupakan sistem pemasaran dengan cara bekerja sama dengan perusahaan *retailer*, CV. Bening Jati Anugrah bekerja sama dengan perusahaan *retailer* yaitu LotteMart, dimana produk siomay ikan ini dijual ke *retailer* dengan harga Rp. 30.000,-/Kg, sedangkan LotteMart menjual produk siomay kepada konsumen dengan harga Rp 35.000 / Kg , sehingga margin yang diperoleh yaitu Rp. 5000,-/Kg.

### 3.3 Karakteristik Konsumen

Konsumen dapat dibedakan secara demografis yaitu menurut perbedaan umur, suku, ras, agama, latar belakang pendidikan, pekerjaan, penghasilan, jabatan dan jumlah anggota keluarga. Faktor demografis mempunyai pengaruh besar

sekali terhadap jenis dan tingkat mendesaknya kebutuhan barang dan jasa. Dengan demikian faktor demografis akan mempengaruhi jenis dan jumlah barang dan jasa yang dibeli tiap golongan konsumen (Sutojo, 2011).

Berdasarkan hasil survei responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak membeli dari pada responden yang berjenis kelamin laki-laki. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Responden	
	Jumlah (Orang)	%
Laki-laki	23	38
Perempuan	37	62
Total	50	100

Sebagian besar responden siomay ikan kakap termasuk pada usia produktif. Kelompok umur produktif responden kebanyakan sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur

Umur	Responden	
	Jumlah (Orang)	%
< 20 Tahun	2	4
20 - 25 Tahun	5	10
26 - 30 Tahun	16	32
31 - 40 Tahun	15	30
41 - 50 Tahun	12	24
> 50 Tahun	0	0
Total	50	100

Mayoritas responden dengan tingkat pendidikan rendah (SD, SMP), sedang (SMA), maupun tinggi (D3, Sarjana) memiliki kesadaran untuk lebih peduli kesehatan yaitu dengan memperhartikan faktor gizi pada makanan yang dikonsumsi, salah satunya pada produk siomay ikan kakap. Jumlah karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan Terakhir	Responden	
	Jumlah (Orang)	%
SMP	2	4
SMU	31	62
Diploma (D3)	5	10
S1	11	22
S2	1	2
Total	50	100

Jenis pekerjaan responden siomay ikan kakap adalah beragam jenisnya, berbagai jenis pekerjaan tersebut tentunya juga berbeda dengan tingkat pendapatan, sehingga masing-masing memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengambil keputusan untuk menentukan pengeluaran atau memenuhi kebutuhannya. Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaannya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan

Pekerjaan	Responden	
	Jumlah (Orang)	%
Pelajar	6	12
Pegawai Negeri Sipil	6	12
Pegawai Swasta	10	20
Wiraswasta/Pengusaha	11	22
Ibu Rumah Tangga	17	34
Total	50	100

Sebagian besar responden siomay ikan kakap pendapatannya adalah diatas Rp. 1.000.000 karakteristik responden berdasarkan jumlah pendapatannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Karakteristik responden berdasarkan jumlah pendapatan

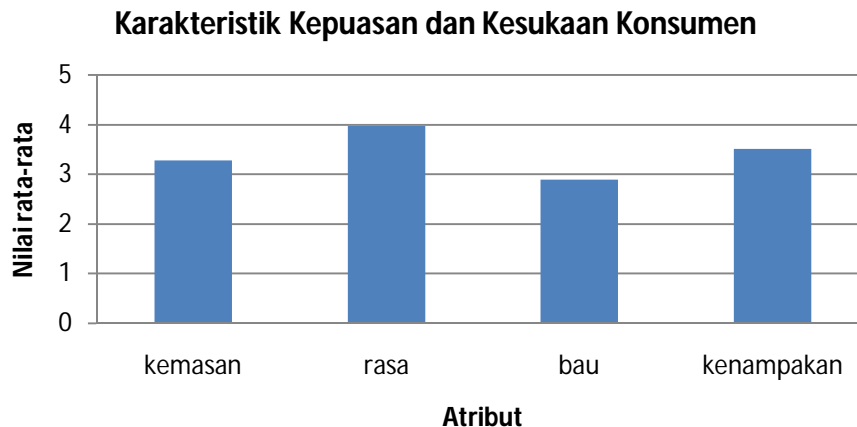
Penghasilan/bulan (Rp)	Responden	
	Jumlah (Orang)	%
Belum berpenghasilan	6	12
500.000 - 1.500.000	5	10
1.500.000 – 2.500.000	21	42
2.500.000 – 3.500.000	14	28
> 3.500.000	4	8
Total	50	100

### 3.4. Karakteristik terhadap kesukaan dan kepuasan konsumen

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah mutu produk dan pelayanannya, kegiatan penjualan, dan nilai-nilai perusahaan (Umar, 2005).

Pengambilan keputusan oleh konsumen dalam setiap pembelian suatu produk akan mempertimbangkan atribut-atribut yang ada pada setiap produk. Konsumen yang membeli produk siomay ikan kakap mempertimbangkan berdasarkan kesukaan dan kepuasannya yang meliputi rasa, bau, kenampakan, dan kemasan. Atribut yang melekat pada siomay ikan kakap merupakan daya tarik bagi konsumen pada saat membeli, untuk mengetahui sikap konsumen terhadap produk siomay ikan kakap maka perlu dianalisis mengenai tingkat kesukaan dan kepuasan

konsumen terhadap produksi may ikan kakap. Tingkat kesukaan dan kepuasan konsumen dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik karakteristik berdasarkan kesukaan dan kepuasan konsumen

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, dapat diketahui bahwa atribut yang paling dipertimbangkan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap siomay ikan kakap adalah atribut rasa. Konsumen cenderung memilih atribut rasa sebagai pertimbangan pertama dalam melakukan pembelian terhadap siomay ikan kakap, dibandingkan dengan atribut lain. Rasa dan kekenyalan secara langsung dapat dirasakan atau dinikmati oleh indera pengecap seseorang.

Atribut kedua yang dipertimbangkan oleh konsumen adalah kemasan. Kemasan sangat penting bagi konsumen, kaitanya untuk menjaga ke higienisan dari siomay ikan kakap serta untuk mengetahui berbagai informasi yang tercantum seperti komposisi dan masa kadaluarsa. Atribut ketiga yang dipertimbangkan konsumen untuk membeli siomay ikan kakap adalah bau, pada atribut ini konsumen sangat mempertimbangkan untuk membeli siomay ikan kakap karena bau dapat langsung dirasakan oleh indera pencium.

Adanya analisis mengenai tingkat kesukaan dan kepuasan konsumen, maka dapat membantu produsen dalam mengetahui atribut apa yang paling dipertimbangkan dan tidak dipertimbangkan oleh konsumen, sehingga dari hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan langkah perbaikan produsen dalam memperbaiki kualitas dari produk siomay ikan

## KESIMPULAN

1. Usaha pengolahan siomay di CV. Bening Jati Anugrah secara aspek finansial investasi *payback periode* (PP) selama 1 tahun 2 bulan 5 hari, *Net Present Value* (NPV) Rp 19,574,186, *Internal Rate of Return* (IRR) 20,29%, *B/C Ratio* 1,20%,  $BEP_{(Q)}$  302 bungkus, dan  $BEP_{(Rp)}$  Rp3,752,224.
2. Rantai distribusi yang dilaksanakan di CV. Bening Jati Anugrah adalah sistem pemasaran langsung dan tidak langsung, dimana untuk pemasaran langsung konsumen datang langsung ke CV. Bening Jati Anugrah dan pemasaran tidak langsung yaitu melalui sistem *Retail modern* di *supermarket* "lottemart" dan para agen serta pengecer.
3. Sebagian besar konsumen produk siomay ikan kakap dengan tingkat pendidikan menengah (SMA), dan memiliki profesi yang beraneka ragam

dengan pendapatan diatas Rp. 1.000.000, dan atribut-atribut yang dipertimbangkan oleh konsumen berurutan adalah rasa, kemasan, kenampakan, dan bau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ibrahim. 2003. Studi Kelayakan Bisnis. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Kasmir dan Jakfar. 2006. Studi Kelayakan Bisnis. Kencana. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011. Pusat data, statistik dan informasi. Pusat Data Statistik dan Informasi. Jakarta.
- Kotler, P. 1997. Manajemen Pemasaran, edisi Sembilan. Prentice-Hall, Inc. New Jersey.
- Marius, P. A. 2002. Dasar-Dasar Pemasaran. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nurjanah. 2011. Pengetahuan dan Karakteristik Bahan Baku Hasil Perairan. PT Penerbit IPB Press. Bogor.
- Pandji, A. 2000. Manajemen Bisnis. Rineka Cipta. Jakarta
- Pertiwi, I. 2000. Analisa Pemasaran Usahatani dan Saluran Pemasaran. Skripsi Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor. (tidak dipublikasikan)
- Silvanie, F. 2003. Analisis Efisiensi Saluran Pemasaran. Skripsi Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor. (tidak dipublikasikan)
- Sourana, M. 2002. Analisis Pemasaran Kemiri. Skripsi. Jurusan Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor. (tidak dipublikasikan)
- Sudari dan Ismanadji. 1985. Analisis Mutu Pangan. Penebar Swadaya. Jakarta
- Umar, H. 2005. Studi Kelayakan Bisnis, edisi 3. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

## **PERTANYAAN**

- Apakah produksi di CV Benih Anugrah berdaya tahan produk?

## **JAWABAN**

- Harga Rp. 30.000/kg biasanya dijual per pack dan 1 packnya berisi ½ kg. Produk yang dijual mudah basi pada suhu freezer, hanya dapat bertahan 3 bulan, sebagai contoh adalah siomay. Pemanfaatan dengan suhu tinggi dan produk yang dijual bermacam-macam, tetapi yang paling laku di pasaran adalah produk siomay. Untuk pengemasan produk sudah sesuai informasi dari binaan pemerintah Bogor.